KPK DAN MKD MEMBIDIK AZIS

FATWA HAJI MASA PANDEMI

GATRA

SIASAT FIRLI

INISIATIF KETUA KPK MENGGELAR TES WAWASAN KEBANGSAAN DITUDING CACAT ETIK DAN MALADMINISTRATIF. JUGA DIDUGA JADI ALAT MENGGUSUR PARA PENYIDIK YANG BERSEBERANGAN KEPENTINGAN.

20-26 MEI 2021
30
XXVII
9 770853 170601
Rp 42.500 (Luar Jawa Rp 43.500)

GATRA MEDIA GROUP

SINCE 1994

Kami Hadir Selama Ini,
Karena
Kami Dapat Dipercaya

Kini, berita dan informasi yang akurat
dan objektif dari **GATRA** dapat diakses
melalui berbagai portal berita yang kami miliki.
Segera bergabung dan jadi masyarakat Indonesia
yang cerdas dan terinformasi dengan benar.

GATRA.com GATRA review GATRA pedia

GATRA magazine GATRA TV GATRA SUMBAGSEL GATRA Jawa Tengah

Baca GATRA, Baru Bicara

Unduh Aplikasi GATRA
di Smartphone Anda

Google Play App Store

Gedung Gatra, Jl. Kalibata Timur IV No.15
RT.10/RW.1, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740
Telp. (021) 7973535

@Gatramediagroup @gatracomID @gatra_news

mutu international

Segenap keluarga besar
MUTU INTERNATIONAL
mengucapkan

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1442 Hijriah

Minal Aidin Wal Faizin
Mohon Maaf Lahir dan Batin

DAFTAR ISI

No. 30 Tahun XXVII 20-26 Mei 2021

ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO

Laporan Utama 10

BOLA PANAS FIRLI

Tes Wawasan Kebangsaan diduga menjadi alat Firli Bahuri menggusur sejumlah pegawai KPK yang berseberangan. Langkah menonaktifkan 75 pegawai tidak mendapat dukungan Presiden. Diserang balik pegawai lewat aduan pelanggaran etik.

6 Teropong
28 Pendidikan
Dua Sandungan Mas Menteri
36 Internasional
Jepang Siap Buang Limbah Nuklir ke Laut
40 Kesehatan
Siap-siap Adang Lonjakan Penularan
44 Gaya Hidup
Ramai-ramai Main Kripto
48 Agama
Hasrat Haji di Kala Pandemi
56 Ekonomi
Kurang Bertenaga Karena Mudik Dilarang
60 Hukum
Langgam Intrik Mafia Tanah

Kulit Muka:
DIOLAH DARI FOTO GATRA/ADI WJAYA

Nasional

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA

24

Senayan dan Kuningan Membidik Azis

KPK mulai fokus menyelisik dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam perkara suap Penyidik KPK. Di DPR, MKD akan memanggil semua pelapor yang mengadukan Wakil Ketua DPR RI itu. Meski sudah siapkan bantuan hukum, belum ada keputusan dari Golkar.

Internasional

YOUSEF MASOUD / SOPA IMAGES/SIPA USA

32

Dunia Mengutuk Agresi Militer Israel

Meningkatnya agresi militer Israel di Palestina telah menewaskan ratusan jiwa. Bibit pertikaian yang tak berkesudahan berpotensi memunculkan kembali perlawanan Intifada. Banyak negara mengutuk agresi militer Israel yang mematikan.

Ekonomi

ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR

52

Menakar Optimisme Lolos dari Resesi

Satu tahun pandemi, Indonesia belum lepas dari jurang resesi. Insentif untuk meningkatkan konsumsi belum berdampak. Pemerintah optimistis, pertumbuhan ekonomi tahun ini tembus 7%.

DOK.GATRA/DHARMA WIJAYANTO

RISMA & SATU METER BUKU

Apa&Siapa 65

Semua artikel ini bisa diakses melalui :
www.gatra.com

GATRA PUSTAKA

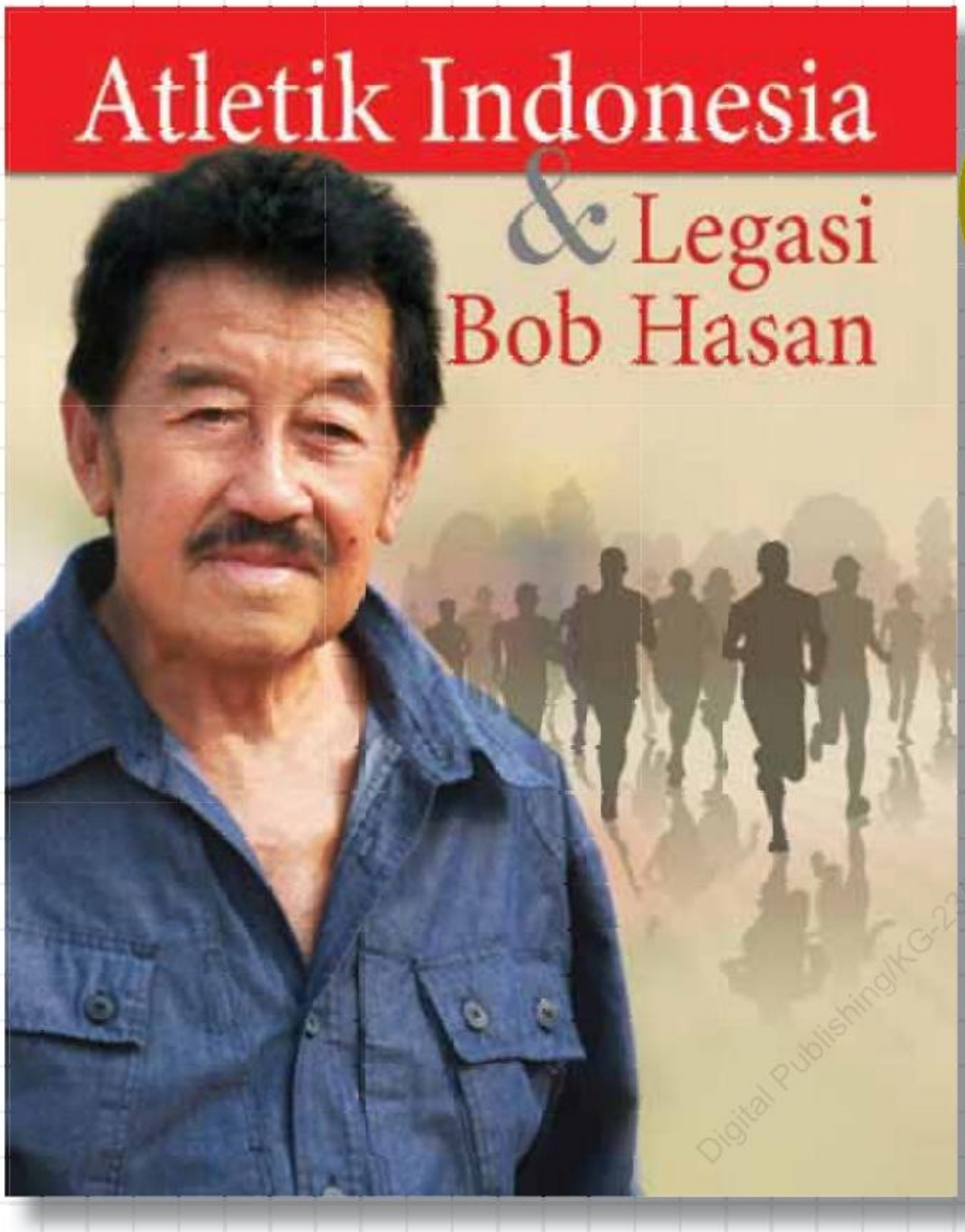

TELAH TERBIT

Atletik Indonesia dan Legasi Bob Hasan merangkum beberapa periode perjalanan atletik dari era sebelum kemerdekaan, terutama dari 1976 hingga 2020. Buku ini mengisahkan jerih payah Bob Hasan membangun fondasi atletik di Indonesia, hingga akhirnya menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional melalui PB PASI.

HARGA

Rp120.000,-

Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua Umum PB PASI 2021-2025

Tigor Tanjung
Sekjen PB PASI 2021-2025

"Buku ini tidak hanya mengungkapkan tantangan-tantangan dan strategi dalam pembinaan atletik, tetapi juga mengajak kita semua sebagai bangsa untuk berkontribusi dalam menyehatkan masyarakat, sekaligus mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional melalui ajang atletik.

"Orang boleh saja bilang bahwa dia ini, kan, temannya Pak Harto. Namun ketika Pak Harto sudah tidak berkuasa, Pak Bob tetap berkomitmen dalam memimpin PASI. Bagaimana gilanya dia kepada atletik.

Pemesanan bisa menghubungi Layanan Pelanggan :
Telp. (021) 7973535 | Direct : 081288002822 (Puspita) | E-mail : sirkulasi@gatra.com

YOUTUBE/GOJEK

Gojek-Tokopedia Merger Jadi GoTo

Dua *unicorn* Indonesia, Gojek dan Tokopedia, resmi merger dan mengumumkan pembentukan Grup GoTo pada Senin, 17 Mei lalu. GoTo diklaim merupakan grup teknologi terbesar di Indonesia yang menjadi ekosistem andalan masyarakat dengan menyediakan berbagai solusi untuk menjalani keseharian atau "*go to ecosystem for daily life*". Merger ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia, sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia.

Dengan merger ini, mitra pengemudi Gojek memiliki peluang memperoleh pendapatan lebih besar, antara lain dengan mengirimkan lebih banyak pesanan dari pengguna Tokopedia. Sementara itu, penjual dan mitra usaha (*merchant)* Tokopedia akan mendapatkan berbagai manfaat dan kesempatan untuk meningkatkan usahanya. "Hadirnya Grup GoTo juga akan memungkinkan kami untuk semakin mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara," CEO GoTo, Andre Soelistyo, mengungkapkan.

Secara grup, GoTo memiliki *total gross transaction value* (GTV) lebih dari US$22 miliar (sekitar Rp314,6 triliun) pada 2020 lalu. Diketahui ada lebih dari 1,8 miliar transaksi sepanjang 2020. Per Desember 2020, ada lebih dari 2 juta mitra pengemudi Gojek yang terdaftar dan lebih dari 11 juta mitra usaha Tokopedia. Selain itu, terdapat lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan (*monthly active user* —MAU). GoTo akan menggarap potensi besar pertumbuhan ekonomi Indonesia — terbesar di Asia Tenggara—yang memiliki segmen kelas menengah yang terus bertumbuh pesat serta populasi muda yang sangat tanggap teknologi.

Presiden GoTo, Patrick Cao, mengungkapkan, model bisnis GoTo mengombinasikan transaksi platform Gojek yang memiliki volume dan frekuensi yang tinggi, dengan platform *e-commerce* Tokopedia yang memiliki frekuensi medium, namun dengan nilai transaksi tinggi. "Ke depannya, Grup GoTo akan berkontribusi lebih dari 2% kepada total PDB (produk domestik bruto) Indonesia dan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang penghasilan seiring dengan berkembangnya bisnis kami dan bertumbuhnya ekonomi," Patrick menambahkan.

Gojek dan Tokopedia didirikan lebih dari satu dekade yang lalu. Keduanya pertama kali bekerja sama pada 2015 untuk mempercepat layanan pengiriman *e-commerce* menggunakan jaringan mitra pengemudi Gojek. Gojek dan Tokopedia akan tetap beroperasi sebagai entitas yang berdiri sendiri, di dalam ekosistem Grup GoTo.

GoTo memiliki daftar investor *bluechip* termasuk (sesuai abjad) Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank Vision Fund 1, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa, dan Warburg Pincus.

FLORA LIBRA YANTI

Digital Public Archive/KG-23/ERAMI

Pemerintah Hentikan Sementara Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV54

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca *batch* (kumpulan produksi) CTMAV547. Selanjutnya, *batch* tersebut akan dilakukan uji toksisitas dan sterilitas oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Ini adalah bentuk upaya kehatihatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini," ujar juru bicara Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi pada Minggu, 16 Mei lalu.

Siti menerangkan bahwa tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Hanya Batch CTMAV547 yang dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pengujian dari BPOM yang kemungkinan memerlukan waktu satu hingga dua minggu.

"*Batch* AstraZeneca selain CTMAV547 aman digunakan, sehingga masyarakat tidak perlu ragu," Siti menegaskan. "Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoaks yang beredar. Masyarakat diharapkan selalu mengakses informasi dari sumber terpercaya."

Penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia tetap terus berjalan karena vaksinasi Covid-19 membawa manfaat lebih besar. Hingga saat ini, berdasarkan data Komnas KIPI (Komisi Nasonal Kejadian Ikutan Pascaimunisasi) belum pernah ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Dalam beberapa kasus sebelumnya, meninggalnya orang yang statusnya telah divaksinasi Covid-19 adalah karena penyebab lain, bukan akibat dari vaksinasi yang diterimanya.

Petugas kesehatan menunjukkan vaksin AstraZeneca

ANTARA FOTO/TEGUH PRIHATNA

Batch CTMAV547 saat ini berjumlah 448.480 dosis dan merupakan bagian dari 3.852.000 dosis AstraZeneca yang diterima Indonesia pada 26 April 2021 melalui skema Covax Facility WHO (World Health Organization). *Batch* ini sudah didistribusikan untuk personel TNI dan sebagian ke DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, membandingkan penggunaan vaksin AstraZeneca di Malaysia. Di negeri jiran itu, Tjandra mengungkapkan, masyarakat dapat menggunakan vaksin AstraZeneca bila mereka menginginkannya. "Jadi tergantung pilihan sendiri atau *option*," ujar Tjandra. Pemerintah Malaysia memang menyediakan bebertapa jenis vaksin yaitu vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBio, dan Gamaleya.

Flora Libra Yanti

Waroeng Damandiri & Homestay Kalasan Karangmojo, Karang Mojo, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengatasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Pemerintah dan sektor swasta bahu-membahu mengatasi dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat.

Pandemi Covid-19 sudah setahun lebih melanda Indonesia. Dampaknya sangat terasa terhadap kehidupan masyarakat. Kegiatan ekonomi terganggu, dan banyak masyarakat terpuruk karena berhenti bekerja akibat perusahaannya bangkrut atau berhenti berdagang karena berkurangnya pembeli.

Pemerintah terus berupaya memulihkan ekonomi melalui berbagai program. Dana desa yang dialokasikan pemerintah sebagian telah diarahkan untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi terhadap ekonomi masyarakat di pedesaan.

Berbagai kalangan, termasuk akademisi, juga berharap pemerintah memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat di desa-desa yang terpuruk akibat wabah Covid-19. Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pemerhati desa Arie Sujito berharap anggaran desa (AD) ke depan fokus pada peningkatan perekonomian.

Arie melihat desa harus segera didorong untuk menciptakan lapangan kerja yang berbasis peningkatan ekonomi. Karena itu, sudah saatnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) melakukan revisi pada fokus penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.

Berbeda pada awal kehadiran AD maupun ADD pada 2015 yang fokus pada pembangunan infrastruktur, khususnya pada desa di wilayah tertinggal.

Ke depan sudah saatnya fokus diubah bagaimana anggaran itu terbukti pada pemanfaatan kebutuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Serta pembangunan jaringan dan instalasi penyaluran distribusi barang atau jasa di desa.

"Ini tidak gampang. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat. Sebab, seringkali proses kreatif di desa terganggu regulasi di atasnya. Desa harus diberi kesempatan seluas-luasnya," tuturnya.

Itu artinya, pemerintah jangan terlalu turut campur atau memberikan arahan yang sangat detail tentang pembangunan desa. Kebijakan dan aturan harus bersifat makro, yang kemudian bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan serta potensi desa.

Diharapkan nantinya desa akan menjadi lembaga yang mempertemukan kekuatan dan pilar demokrasi kewargaan di tingkat lokal yang kaya oleh keragaman tradisi. Walhasil, kondisi ini membuat desa tidak lagi menjadi objek pembangunan. "Tapi menjadikan desa mandiri dan menjadi subjek," ia melanjutkan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa hingga akhir 2020 Pemerintah telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp695 triliun untuk penanganan Covid-19.

Khusus pada sektor kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah, anggaran yang telah terserap sampai akhir 2020 mencapai Rp65,97 triliun. Penggunaan anggaran ini, termasuk program padat karya yang nilainya sebesar Rp17, 84 triliun.

Dampak terhadap UMKM

Pandemi Covid-19 di sektor ekonomi menyebabkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor usaha bermodal kecil ini mengalami kelesuan di berbagai daerah. Di Jawa Tengah, sebanyak 23.900 UMKM terancam bangkrut karena terdampak wabah corona.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.Soc.Sc, mengatakan dampak Covid-19 telah mengurangi pengeluaran diskresioner, penutupan pabrik, hingga larangan bepergian. UMKM menjadi salah satu subsektor yang terdampak secara signifikan, terutama usaha berskala mikro.

Menurut Prasetio, dari 23.900 UMKM yang terancam bangkrut, sebanyak 65% di antaranya merupakan UMKM yang bergerak di produksi makanan dan minuman, disusul UMKM yang menekuni dunia fesyen, kemudian usaha *handycraft* atau kerajinan tangan.

"Berbagai permasalahan dihadapi UMKM selama pandemi, di antaranya UMKM tak bisa mengangsur kredit di bank, banyak yang tak lagi berproduksi, atau masih produksi tapi kesulitan mencari bahan baku," kata Prasetio.

Dampak di sektor ekonomi yang melanda UMKM, kata Prasetio, perlu mendapat perhatian yang serius, karena peran sentralnya dalam menopang perekonomian di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional sebesar 60%, di antaranya melalui kontribusi pajak yang dibayarkan dan dalam pengurangan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi, yakni sekitar 90%.

Prasetio mengatakan, masalah lain di saat Pandemi di sektor ekonomi, adalah keterjangkauan pasar yang belum menyentuh sektor *online* bagi sebagian pelaku usaha UMKM.

"Rata-rata UMKM masih berproduksi namun kesulitan dalam pemasaran, sementara terdapat sejumlah UMKM yang tetap eksis, bahkan justru mengalami peningkatan penjualan, sehingga beberapa UMKM mengalihkan jenis usahanya untuk memproduksi jenis produk yang diminati pasar saat ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Tengah, Dra. Ema Rahmawati, MHum, mengatakan rencana penanganan terhadap para pelaku UMKM yang terdampak Covid -19 di Jawa Tengah adalah dengan memberikan bantuan sosial modal kerja.

Menurut Ema, saat ini Dinas Koperasi sudah melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan sosial modal. Saat ini ada 170.000 nama UKM yang telah terdata melalui OPD kabupaten / kota dan jejaring UKM.

Selain itu, Dinas sudah melakukan sosialisasi untuk mendata UKM anggota koperasi, agar mendapatkan akses subsidi bunga dan 3 program pemulihan dari LPDB. "Kami bekerja sama dengan Baznas akan memberikan bantuan modal melalui program Baznas Micro Finance dengan nominal Rp5 juta per orang dan satu kelompok untuk satu kota/kabupaten dengan anggota 10 orang, dengan pengembalian sistem infak," kata Ema.

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Dr. Izza Mafruhah, SE, MSi, mengatakan bahwa untuk mengatasi dampak ekonomi pemerintah perlu menyusun strategi untuk memulihkan ekonomi khususnya di sektor UMKM dengan memberikan keringanan kendala likuiditas seperti penangguhan membayar pajak, penangguhan membayar angsuran, penyediaan hibah, dan subdisi pasca-Covid-19 untuk memulai usaha baru.

Menurut Izza, untuk membantu para pelaku UMKM untuk bisa eksis dalam wirausaha adalah dengan memberikan skema dan pendampingan khusus dalam penyiapan pengembangan pasca-Covid-19. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kemampuan UMKM di bidang teknologi untuk mengadopsi munculnya *new normal* yang memaksa UMKM mengubah pola produksi dan pemasaran.

"Kami mengusulkan dibentuknya aspek kelembagaan menuju adaptasi kebiasaan baru dengan penyusunan regulasi pendukung pemulihan ekonomi, pelatihan terstruktur dalam produksi, dan pemasaran menuju adaptasi kebiasaan baru dan *supporting institution* dari perbankan, akademisi, dan masyarakat," kata Izza.

Peran Pihak Swasta

Organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta berkolaborasi atau bergotong royong dalam membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Indika Foundation, misalnya, telah membantu memberikan bantuan alat pelindung diri (APD), sembako, hingga buku dan mainan untuk anak-anak, untuk masyarakat terdampak pandemi.

Bantuan juga diberikan tim pengabdi masyarakat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI). Dipimpin oleh Dr. Widyatuti, M.Kes., Sp.Kom, bersama mahasiswa pascasarjana, bekerja sama dengan YBM PLN dan Yayasan Biman, mereka membuat beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Program bernama "Cinta Raga" itu mengajak warga bercocok tanam di pekarangan sendiri, untuk memenuhi gizi harian mereka tanpa harus membeli dari luar. Program ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu menanam dengan Media Vertikultur, Penyuluhan Kesehatan, dan Pelatihan Pengolahan Makanan.

Warga yang mengikuti program "Cinta Raga" ini berasal dari kelompok yang memenuhi syarat penerima bantuan YBM PLN. Sejumlah warga di Depok, Jawa Barat, yang telah mengikuti program ini mengakui program "Cinta Raga" sangat bermanfaat bagi keluarganya. Dengan program ini mereka dapat memanfaatkan lahan minim di rumah yang ia tempati untuk menanam sayur lalu diolah menjadi bahan makanan untuk keluarganya.

Semoga kegiatan ini membantu masyarakat mengembangkan kemandirian ekonomi dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga sebagai bentuk ketahanan pangan masyarakat. ●

FOTO-FOTO GATRA/ ADI WIJAYA

ADV

BOLA PANAS FIRLI

TES WAWASAN KEBANGSAAN DIDUGA MENJADI ALAT FIRLI BAHURI MENGGUSUR SEJUMLAH PEGAWAI KPK YANG BERSEBERANGAN. LANGKAH MENONAKTIFKAN 75 PEGAWAI TIDAK MENDAPAT DUKUNGAN PRESIDEN. DISERANG BALIK PEGAWAI LEWAT ADUAN PELANGGARAN ETIK.

Dilarang Publishing/KG-23/ERAMI

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, 5 Mei 2021, mengumumkan ada 75 dari 1.351 pegawainya tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), bagian dari tahapan alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dua hari setelahnya, KPK menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan. Surat itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya ditandatangani Plh Kepala Biro SDM, Yonathan Demme Tangdilintin. Lewat surat itu, pegawai yang tidak lolos TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan langsung.

Wakil Ketua Wadah Pegawai KPK, Harun Al Rasyid, yang masuk dalam daftar tidak lolos TWK menyebut bahwa keputusan Pimpinan KPK itu sebagai pertunjukan ketidakadilan. Ia menilai, SK tersebut sebagai inisiatif dan arogansi personal Ketua KPK, Firli Bahuri. "Ketua KPK bergerak di ruang gelap dengan cara dan proses yang gelap, menerbitkan SK non-*job* bagi 75 pegawai," katanya.

ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO

Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji usai memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

Harun mengaku, beberapa kali mencoba komunikasi dengan unsur Pimpinan KPK lainnya dan mendapati fakta bahwa kepemimpinan tidak lagi kolektif kolegial. Ia enggan menyebut pimpinan mana yang dimaksud. Namun, ia yakin Ketua KPK-lah yang mendorong dilakukannya TWK. "Andai pimpinan lain berani nyatakan ke publik bahwa yang disampaikan Ketua KPK bahwa pelaksanaan TWK itu keinginan pimpinan kolektif kolegial tidak benar dan omong kosong, pasti sudah *game over* (selesai) ini," ujarnya.

TWK sejatinya tidak masuk dalam skenario peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Beberapa pihak menyebutnya sebagai insiatif Firli yang dilandaskan pada Peraturan Komisi.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, mengungkap bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menjadi dasar ketidaklulusan. Salah satunya, ia dapat informasi dari Ketua Dewan Pengawas (Dewas), Tumpak Panggabean, soal Novel Baswedan tidak lulus TWK karena hubungan kerja yang sering kali bertentangan dengan pimpinan. Kedua, ada juga alasan seseorang dianggap punya pemikiran liberal. Tumpak sendiri merupakan pejabat struktural yang ikut membuka dan membaca dokumen-dokumen hasil tes.

"Bisa dibayangkan, orang baru berpikir sudah dihukum. Ini jelas melanggar HAM," kata Sujanarko kepada wartawan seusai melaporkan pimpinan KPK ke Dewas.

Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris, mengatakan bahwa Dewas tidak pernah dilibatkan dalam proses alih status pegawai dan skema TWK. Syamsudin secara pribadi berpendapat bahwa TWK bagi pegawai KPK memang bermasalah. "Tidak bisa jadi dasar pemberhentian pegawai," katanya melalui pesan singkat kepada GATRA.

Sujanarko (kiri) didampingi Novel Baswedan (kanan) menunjukkan surat pelaporan terhadap anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji

***

Kejanggalan demi kejanggalan terkuak di balik penonaktifan 75 pegawai KPK dengan beragam latar belakang jabatan. Tak ingin tinggal diam, perwakilan pegawai pun memutuskan mengadukan Pimpinan KPK ke Dewas secara resmi pada Selasa, 18 Mei 2021. Novel Baswedan bersama Sujanarko dan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK, Giri Suprapdiono, mewakili 75 pegawai. "Ada masalah serius dengan keputusan Pak Firli Bahuri memerintahkan diserahkan tugas dan tanggung jawab," kata Novel.

Mereka juga merasa Anggota Dewas Indriyanto Seno Adji memihak pimpinan. Padahal, Dewas memiliki fungsi pengawasan. Indriyanto merupakan pengganti Artijo Alkotsar yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kehadirannya bersama Firli saat konferensi pers pengumuman hasil

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT

memenuhi syarat.

Menurut Novel, laku penonaktifan ini bukan pelanggaran kode etik pertama yang dilakukan pimpinan. Sebelumnya, Firli juga melakukan beberapa pelanggaran kode etik, baik ketika masih menjadi Deputi Penindakan dan setelah menjadi Ketua KPK. "Pelanggaran kode etik serius ini bukan pertama kali. Sebelumnya pernah diperiksa dan diputus melakukan kesalahan," ia menjelaskan.

Novel merujuk pada keputusan Dewas yang menyebut Firli melanggar kode etik karena gaya hidup mewah pada September 2020 lalu. Diketahui, Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja. Firli dinyatakan melanggar kode etik mengenai gaya hidup mewah ga pernah melanggar kode etik ketika menjabat Deputi Penindakan KPK karena menemui Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Zainul Majdi, atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), Wakil Ketua BPK Bahrullah, dan pimpinan partai politik. Saat itu ia mendapat sorotan, karena lolos calon Pimpinan KPK meski melanggar etik. Saat uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Firli mengakui pertemuan itu, tetapi berlangsung tanpa sengaja dan tanpa membicarakan apa pun.

Adapun Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo, mengaku hasil TWK dan keluarnya SK membuat proses penyidikan kasus terhambat. Klausul dalam SK memintanya menyerahkan tanggung jawab pada atasan. "Artinya, kemarin saya sudah tidak bisa menangani kasus-kasus sampai ada keputusan berikutnya.

"Ada masalah serius dengan keputusan Pak Firli Bahuri memerintahkan diserahkan tugas dan tanggung jawab."

Novel Baswedan

TWK yang digelar pimpinan KPK pada 5 Mei lalu dianggap menyalahi kewenangannya.

Secara awam, perintah itu aneh menurut Novel, karena SK yang terbit terkait hasil TWK, tetapi diminta menyerahkan tugas. Bagaimanapun yang dibuat pimpinan menurutnya harus berdasar aturan hukum. Firli, lanjutnya, bukanlah pemilik KPK dan tidak bisa sewenang-wenang tanpa dasar. Jika dibiarkan, ia khawatir ini menjadi upaya penyingkiran dengan pola tertentu dengan membuat seolah-olah pegawai berprestasi tidak oleh Dewas KPK pada Kamis, 24 September 2020.

Diketahui, Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja. Firli dijatuhi sanksi ringan berupa Teguran Tertulis II. Dewas KPK menilai, Firli terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Sebelumnya, pada era Undang-Undang KPK sebelum revisi, Firli juApa dan kapannya tidak dijelaskan. Itu yang kami sayangkan," ucapnya.

Yudi menyatakan, TWK sendiri tidak bisa dilepaskan dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU KPK. Hal tersebut mengingat tes ini dapat berfungsi sebagai filter untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas, profesional, serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK.

Setidaknya, kata Yudi, dari 75 orang, ada tujuh kasatgas dan enam penyidik yang terpaksa tidak

KASUS-KASUS DITANGANI PENYIDIK KPK YANG TIDAK LULUS TWK

Bansos Covid-19
Penyidik:
Andre Nainggolan (Kasatgas)

Ekspor Benur KKP
Penyidik:
Novel Baswedan (Kasatgas)

Kasus Samin Tan
Penyidik:
Ambarita Damanik (Kasatgas)

Korupsi Tanjung Balai
Penyidik:
Rizka Anungdata (Kasatgas)

Kasus Dugaan Suap Reklamasi Teluk Jakarta
Penyidik:
Budi Agung Nugraha (Kasatgas)

Operasi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk
Penyidik:
Harun Al Rasyid

Keterangan: diolah dari berbagai sumber

bisa melanjutkan kerjanya. Mereka menangani kasus-kasus seperti korupsi dan suap di Tanjung Balai, bansos, dan ekspor benur. Menurutnya, Firli paham betul orang-orang yang menangani kasus itu dan apa saja tugasnya. Sebagai penyidik madya yang sudah 14 tahun berkarier di KPK, ia mengaku baru kali ini terjadi. Aktivitas penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi yang sehari-hari ia lakoni, otomatis terhenti. Ia mengaku tetap berkomitmen dan berkantor, meskipun tugas diserahkan kepada atasan.

GATRA berupaya mengonfirmasi kepada Ketua KPK Firli Bahuri melalui pesan singkat dan telepon seluler, tetapi yang bersangkutan tidak mengangkat panggilan telepon dan tidak menjawab pesan WhatsApp berstatus dalam jaringan.

***

Presiden Joko Widodo buka suara menanggapi kisruh dalam tubuh KPK itu. Presiden memandang hasil TWK terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi.

Menurutnya, hasil tes tersebut juga tidak serta-merta dijadikan dasar memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. "Kalau dianggap ada kekurangan, masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujarnya pada Senin, 17 Mei 2021.

"Pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis."

Presiden Joko Widodo

Digital Publishing/KG-23/EDM

Jokowi sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai untuk diangkat menjadi ASN. KPK, menurut Presiden Jokowi, harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, Presiden menugaskan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, dan Pimpinan KPK agar menindaklanjuti problem administrasi kepegawaian 75 pegawai KPKyang dinyatakan tidak lulus TWK sesuai prinsip-prinsip yang ia kemukakan sebelumnya.Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Ketua KPK yang mengeluarkan aturan soal TWK dan keputusan penonaktifan pegawainya.

Di sisi lain, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menyebut bahwa status 75 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat ini masih pegawai KPK, belum jadi ASN. Maka, kewenangan masih berada penuh di tangan Ketua KPK. "Jadi, masih menjadi kewenangan penuh Pimpinan KPK untuk memutuskan status mereka pasca-tes," katanya kepada GATRA.

Lebih lanjut, Bima menilai bahwa urusan evaluasi serta revisi hasil TWK merupakan domain KPK. Ia berdalih, BKN hanya sebagai asesor dalam pelaksanaan asesmen TWK. Sebagai asesor, strategi format wawancara dengan menggali pendapat melalui beragam isu baginya hal biasa. Termasuk dalam menggali isu radikalisme dalam sebuah lembaga. "Itu strategi asesor untuk menggali seberapa dalam tingkat radikalisme dan intoleransinya. Sah-sah saja, pertanyaan yang sama juga digunakan di TNI dan litsus," ujarnya.

Kini, bola panas ada di tangan Firli Bahuri. Pada situasi itu, sikap Ketua KPK akan menjadi kunci penyelesaian kisruh kepegawaian yang ia semai setelah menabur inisiatif Tes Wawasan Kebangsaan.

SANDIKA PRIHATNALA, WAHYU WACHID, ERLINA SANTIKA, DAN M. ALMER

BPMI/SETPRES

POIN PELANGGARAN ADMINISTRASI

1 Pimpinan KPK menambahkan metode alih status Pegawai KPK, bukan hanya melalui pengangkatan tetapi juga melalui pengujian. Keduanya bertolak belakang dan masing-masing metode memiliki implikasi hukum dan anggaran yang berbeda. Dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak merinci metode pengujian tes wawaasan kebangsaan sehingga bertentangan dengan prisnip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

2 Pimpinan KPK membuat sendiri kewenangan untuk menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan yang tidak diatur dam UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan UU 19/2019 tentang KPK dan PP 41/2020 tentang Alih Status Pegawai KPK.

3 Pimpinan KPK melibatkan lembaga lainnya, melaksanakan TWK untuk tujuan selain alih status pegawai KPK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) PP 41/2020 dan Pasal 18 dan 19 Peraturan KPK No.1 Tahun 2021

4 Pimpinan KPK menggunakan metode pengujian melalui TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK, padahal tidak ada ketentuan dalam Peraturan KPK 1/2021 yang menyatakan demikian.

5 Kelima, pegawai KPK membuat dan menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan selesai.

6 Keenam, pimpinan KPK menambahkan sendiri konsekuensi dari Tes Wawasan Kebangsaan sehingga melampaui kewenangannya. Bertentangan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVUU/2019

Sumber : Pengaduan Perwakilan Pegawai KPK ke Ombudsman

ASA TERHENTI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK SELURUH GUGATAN UJI FORMIL DAN MENERIMA SEBAGIAN UJI MATERIIL UU KPK. PEMBERANTASAN KORUPSI KE DEPAN AKAN MELEMAH?

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya."

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, membacakan keputusan MK atas gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam sidang yang digelar pada Selasa, 4 Mei 2021 itu, Hakim MK menyebut bahwa penolakan ini didasarkan beberapa pertimbangan. Satu di antaranya, mengenai isi gugatan yang menyebut UU KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Polegnas) DPR,MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, mengatakan bahwa RUU KPK sudah masuk dalam Prolegnas sejak lama. Adapun terkait lama atau tidaknya pembahasan itu, tergantung pada UU itu sendiri. "Terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang," katanya.

MK membantah pernyataan terkait adanya dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU KPK hasil revisi. Atas dalil tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan pembuat UU, yakni DPR, sudah melibatkan masyarakat dan *stakeholder* terkait termasuk pimpinan KPK dalam pembahasan RUU. MK juga melihat bahwa Pimpinan KPK sudah diajak untuk terlibat dalam pembahasan. "Secara faktual, KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK," ujarnya.

Terkait dalil naskah akademik fiktif, Saldi mengatakan bahwa MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum. Begitu pula terkait dalil tidak kuorumnya pengesahan RUU KPK dalam rapat paripurna, yang dinilaiMK tidak beralasan menurut hukum. "Naskah akademik yang dijadikan bukti oleh para pemohon adalah naskah akademik yang memiliki halaman depan atau kover per tanggal September 2019, sementara naskah akademik yang dijadikan lampiran bukti oleh DPR tidak terdapat halaman depan atau kabar dan tidak tercantum tanggal," tuturnya.

Gugatan uji formil ini diajukan oleh Tim Advokasi UU KPK yang

ANTARA FOTO / GALIH PRADIPTA

(tengah) membacakan putusan perkara terkait Undang-Undang KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

beranggotakan di antaranya mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang. Persidangan diwarnai *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi, Wahiddudin Adams. Ia menjadi satu-satunya anggota majelis hakim yang berbeda pendapat soal uji formil UU KPK. Salah satu yang disorotinya, yakni soal waktu pembahasan revisi UU KPK yang relatif singkat.

Wahiduddin menyatakan, beberapa perubahan ketentuan mengenai KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental. "Perubahan ini sangat *nampak* sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat, serta dilakukan pada momentum yang spesifik," ucapnya saat membacakan pandangannya di persidangan.

Momentum spesifik itu, kata Wahiduddin, yakni masa di mana hasil pilpres dan pileg 2019 telah diketahui dan mendapat persetujuan

bersama antara DPR dan Presiden. Revisi UU KPK lantas disahkan oleh Presiden menjadi UU, beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti Anggota DPR periode 2014-2019 dan beberapa pekan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden periode pertama.

Meski menolak uji formil, MK mengabulkan sebagian dari gugatan uji materiil yang diajukan (baca infografik). Salah satunya mengenai pemberian penghentian penyidikan alias SP3 oleh KPK. "Menyatakan frasa 'tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun', dalam pasal 40 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2019, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.

***

Gugatan uji formil dan materiil UU KPK di MK, sejak jauh hari jadi harapan bagi pihak yang tidak setuju atas revisi UU KPK. Sekadar menyegarkan ingatan, dampak dari revisi UU KPK membuat masyarakat hingga mahasiswa tergerak melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia. Melalui unjuk rasa yang menamakan #ReformasiDikorupsi, koalisi masyarakat hingga mahasiswa menolak adanya revisi UU KPK yang dipandang tidak pro rakyat.

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Wahiddudin Adams

Setelah rangkaian demonstrasi tidak bisa membuat revisi UU KPK dibatalkan, sejumlah koalisi masyarakat sipil hingga mahasiswa mendesak agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggugurkan UU KPK hasil revisi. Presiden tidak meladeni desakan tersebut. Ia meminta agar masyarakat menggugatnya melalui jalur konstitusional di MK.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, saat ini seluruh lembaga negara sedang menjalankan "misi penting" untuk mematikan KPK. Hal itu disampaikannya karena geram atas ditolaknya keseluruhan uji formil dan dikabulkan sebagian gugatan uji materiil UU KPK.

"Mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ini perlu dibaca juga bahwa ketiga lembaga ini anggotanya pernah terdakwa atau terpidana dalam kasus korupsi yang melibatkan KPK, lembaga tersebut memang tidak nyaman dengan hadirnya KPK," Feri memaparkan kepada GATRA, Selasa lalu.

Bagi Feri, meyakinkan hakim MK jika ada cacat prosedur dalam revisi UU KPK itu memang sulit. "[Padahal] jika kita amati dari sembilan hakim MK yang sebagian besar adalah pakar hukum tata negara, hukum ilmu perundang-undangan, saya dan teman-teman yakin harusnya mereka menerima dengan alasan ilmiah dan dengan berbagai alat bukti, *tapi* faktanya MK tidak menerima," tuturnya.

Feri menilai, pemberantasan korupsi selanjutnya akan penuh tantangan. Apalagi, ia menduga jika penanganan korupsi akan makin melemah di era Presiden Joko Widodo ini. "Tetapi ini sebagai tantangan penting, agar setiap pejuang antikorupsi menyadari bahwa membenahi negara ini bukanlah melalui proses yang mudah," katanya.

Senada dengan Feri, Peneliti Indonesia Corupption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa MK telah gagal melihat pentingnya pemberantasan korupsi tanpa hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ia beranggapan, putusan MK yang menolak sepenuhnya uji formil dan menga-

"Mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ini perlu dibaca juga bahwa ketiga lembaga ini anggotanya pernah terdakwa atau terpidana dalam kasus korupsi yang melibatkan KPK. Lembaga tersebut memang tidak nyaman dengan hadirnya KPK."

Feri Amsari

"Mahkamah Konstitusi harusnya menjadi benteng terakhir untuk menjaga harapan pemberantasan korupsi dengan menolak pengesahan revisi UU KPK, *tapi* sayangnya itu tidak dilakukan."

Kurnia Ramadhana

GATRA/ARDI WIDI YANSAH

bulkan sebagian uji materiil itu akan meneruskan praktik legislasi yang acakadut. "Putusan MK ini akan melanggengkan praktik legislasi yang ugal-ugalan dari pemangku kepentingan, yaitu presiden atau pemerintah dan DPR,"ucapnya saat dihubungi GATRA.

Secara formil, menurut Kurnia, UU KPK bermasalah karena berbagai sebab, antara lain tidak mengakomodasi partisipasi publik dan tidak masuk prolegnas prioritas.Di sisi lain, uji materiil yang dikabulkan sebagian, seperti pasal 12B tentang ketentuan penyadapan harus dilakukan setelah izin tertulis Dewas KPK, pasal 37B Ayat 1 Huruf b soal tugas Dewas terkait izin penyadapan, penggeledahan,dan penyitaan, serta Pasal 47 Ayat 2 terkait proses penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan, cukup terang serta beberapa dilakukan koreksi.

Namun, Kurnia berpandangan bahwa secara kelembagaan, Dewan Pengawas seharusnya tidak ada di KPK, sebab mekanisme pengawasan tetap berjalan tanpa adanya Dewas. "Untuk beberapa poin terutama soal pasal-pasal itu, pandangan MK cukup *clear*, ya, bahwa tugas untuk memberikan suatu tindakan bukan ada di Dewan Pengawas, *tapi* harusnya ada di pimpinan KPK," katanya.

Kurnia menduga, ada barter politik antara DPR dan MK dalam menjalankan sidang gugatan UU KPK. Sebelum revisi UU KPK disahkan, revisi UU MK dikebut agar Hakim MK tidak berganti tiap lima tahun sekali. Kurnia pun mengamini hal tersebut. "Kami mencurigai MK tidak lagi independen untuk memutuskan permasalahan," ucapnya.

Meski demikian, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah diketok oleh MK merupakan sesuatu yang mengikat dan harus dilaksanakan. Atas hal itu, Kurnia tidak berharap banyak lagi kepada KPK yang memang melemah akibat revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 itu.

"Karena satu dari dua faktor utama yang membuat KPK itu seperti saat ini dan tidak dipercaya publik adalah karena UU KPK, Mahkamah Konstitusi harusnya menjadi benteng terakhir untuk menjaga harapan pemberantasan korupsi dengan menolak pengesahan revisi UU KPK, *tapi* sayangnya itu tidak dilakukan," kata Kurnia.

HIDAYAT ADHININGRAT P. DAN M. GURUH NUARY

SIDANG MK SOAL UU KPK

HAKIM MK MENOLAK SELURUH GUGATAN UJI FORMIL

- ☒ Sebagian besar hakim berpendapat, UU KPK sudah memenuhi asas kejelasan tujuan.
- ☒ Satu hakim berbeda pendapat dan menyoroti waktu pembahasan revisi UU KPK yang relatif singkat.

HAKIM MK MENERIMA SEBAGIAN GUGATAN UJI MATERIIL

- ☑ Kata "Pencegahan" di Pasal 1 Angka 3 UU KPK dihapus.
- ☑ Izin sadap, geledah, sita dari Dewan Pengawas dihapus.
- ☑ Penyadapan tidak dipertanggungjawabkan ke Dewas, tetapi harus diberitahukan.
- ☑ Jangka waktu SP3, dua tahun setelah SPDP.
- ☑ SP3 hanya diberitahukan ke Dewas 14 hari setelah dikeluarkan.
- ☑ KPK hanya memberitahukan penggeledahan dan penyitaan ke Dewas, tak perlu izin.

GIRI SUPRAPDIONO
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JANGAN RAGUKAN PRAKTIK KEBANGSAAN KAMI

TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) MENJADI KONFLIK BARU USAI REVISI UNDANG-UNDANG KPK RESMI DIUNDANGKAN. SEBANYAK 75 PEGAWAI TERDAMPAK, DIANGGAP TIDAK LULUS TWK YANG BERUJUNG PENONAKTIFAN. PEGAWAI MENDUGA, ADA KEPENTINGAN TERSELUBUNG DI DALAMNYA.

Digital Publishing/KG-23

Presiden Joko Widodo telah merespons polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TWK sendiri disinyalir memiliki sejumlah kejanggalan sejak pertama kali direncanakan. Mulai dari tidak adanya transparansi saat sosialisasi, hingga konsekuensi tes yang tidak jelas.

Salah satu pegawai yang masuk dalam daftar tidak lolos TWK, yakni Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK, Giri Suprapdiono. Bagi Giri, tes itu bahkan tidak disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Revisi UU KPK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa nuansa di internal KPK, Wartawan GATRA Sandika Prihatnala mewawancarai Giri Suprapdiono. Berikut petikan wawancara yang berlangsung secara tertulis melalui pesan singkat WhatsApp pada Rabu, 19 Mei kemarin:

Benarkah TWK ini muncul dari unsur pimpinan KPK melalui Peraturan KPK Nomor 1/2021?

Benar, Tes Wawasan Kebangsaan tidak dipersyaratkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK dan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN. Kami menduga kuat, ada penyelundupan pasal melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang dilakukan Pimpinan KPK sebagai sarana mewujudkan kepentingan tersembunyi (*vested of interest*) untuk menyingkirkan 75 pegawai yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai PNS. Ini adalah salah satu muatan aduan kami ke Dewas (Dewan Pengawas KPK) pada tanggal 18 Mei 2021, atas dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan KPK terkait TWK.

Pimpinan KPK semestinya memperjuangkan pegawainya agar mudah dalam alih status, karena 75 orang ini bersama pegawai lainnya, sedang bekerja sangat keras memberantas korupsi, menangani kasus besar dan sensitif, membangun sistem pencegahan dan mendidik generasi antikorupsi. Bukan sebaliknya, kami dibebani hal nonteknis polemik TWK. Presiden sudah mencanangkan pemberantasan korupsi, harus didukung sepenuhnya elemen negeri. Tidak boleh berjalan poco-poco dalam memberantas korupsi.

Apakah ada sosialisasi detail kepada pegawai usai keluarnya Peraturan KPK tersebut? Terutama, soal konsekuensi apakah sebagai bahan seleksi atau transisi?

Peraturan KPK tertanggal 27 Januari 2021, yaitu Perkom Nomor 1 Tahun 2021, pernah disosialisasikan pada tanggal 17 Februari 2021. Disampaikan langsung oleh Ketua KPK. Dalam sosialisasi tersebut, kami mempertanyakan apa konsekuensinya jika pegawai tidak lulus asesmen wawasan kebangsaan. Ketua KPK menjawab, tidak perlu khawatir mengenai asesmen wawasan kebangsaan dan menyatakan semua pegawai KPK pasti bisa mengerjakan asesmen wawasan kebangsaan. Sayangnya tidak pernah sekalipun disampaikan adanya konsekuensi tidak memenuhi syarat, sehingga kami diharuskan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan melalui SK Nomor 652 Tahun 2021.

Apakah poin yang Anda lihat dari pernyataan Presiden Jokowi terkait TWK?

Ini satu hal yang kami syukuri dan apresiasi. Semangat dan Komitmen Presiden bersama kami, 75 orang dan ribuan pegawai KPK lainnya yang resah dengan polemik TWK ini. Perlu dipahami bahwa Presiden sebagai Kepala Negara, harus berdiri di semua kepentingan, se-

ANTARA FOTO/JAFKHAIRI

hingga tidak harus memojokkan lembaga tertentu. Kami memahaminya. Harapannya dapat segera dieksekusi oleh Pimpinan KPK, KemenpanRB (Kementerian PAN-RB) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Penggunaan diksi "evaluasi" bisa bermakna bahwa Pimpinan KPK harus membatalkan SK Nomor 652 tentang pencabutan tugas dan tanggung jawab 75 pegawai KPK ini, sekaligus mengevaluasi cara kerja Pimpinan KPK yang tidak transparan dan tidak melindungi pegawainya. Selama ini, pihak eksternal yang sering menggangu kami. Namun kali ini justru kami duga kuat gangguan datang dari Pimpinan KPK, yang tidak mau kami, 75 orang ini, mengabdi kepada negeri, dengan segala praktik dan *track record* kebangsaan kita selama ini.

Kita percayakan Dewas KPK untuk memproses pengaduan kami. Saya berkeyakinan, citra PNS akan bertambah kuat, dengan adanya 75 orang ini, bahwa orang lurus berintegritas adalah ciri dari PNS masa depan. Kami bukan orang yang tidak lulus, tetapi justru kami yang akan menaikkan standar kelulusan PNS masa depan, kita butuh lebih banyak lagi PNS jujur.

Dari pandangan Anda sebagai internal KPK, siapa yang berwenang mengambil keputusan terkait proses alih status pegawai KPK?

Semua tanggung jawab dan proses tentang alih status ini adalah tanggung jawab Pimpinan KPK. Hal ini juga tecermin dari anggaran proses asesmen TWK yang berasal dari KPK. Lembaga lain hanya membantu proses tersebut. Beberapa Anggota DPR pun dalam beberapa kesempatan,[mengatakan] proses alih status ini tidak boleh merugikan pegawai, apalagi memecatnya. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden Jokowi.

Faktanya, Sekjen KPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang semestinya menandatangani SK Nomor 652 tentang penonaktifkan pegawai kami, bukan Ketua KPK. Ini menyalahi UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 [dan] PP 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN. Bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Mei 2021, diabaikan Pimpinan melalui SK Nomor 652 Tahun 2021. KPK menjadi tidak taat hukum, padahal kepastian hukum adalah asas UU KPK.

Fakta lain, adanya ketergesaan dalam menonaktifkan pegawai-pegawai tertentu yang saat ini sedang menangani kasus-kasus yang menyentuh pejabat-pejabat tinggi dan kemungkinan besar akan merembes ke pejabat tinggi lainnya. Fakta ini yang mendorong publik dan pegawai KPK yang berintegritas mempertanyakan keputusan Pimpinan ini, ada apa di balik penonaktifan 75 orang ini.

Menurut analisis Anda, akan ke mana polemik ini bermuara? Banyak pihak melihat ini "akhir" dari KPK?

Kita bisa beradaptasi memaksimalkan peran kami dalam memberantas korupsi, walaupun sejak revisi UU KPK, menjadi sangat tidak mudah. Dalam menjalankan tugasnya, KPK harus independen dari kekuasaan mana pun, dan hal ini masih tertuang dalam UU KPK yang baru. Kami akan tetap independen.

Kekhawatiran kami tentang revisi UU KPK saat ini menjadi kenyataan, seperti turunnya peringkat antikorupsi Indonesia, anjlok tiga poin dari peringkat 85 (skor 40) menjadi 102 (skor 37) dari 180 negara di dunia. Dan seperti saat ini, urusan internal SDM menjadi bulan-bulanan dan kontraproduktif dalam memberantas korupsi. Mestinya kami fokus bekerja, bukan mempertahankan eksistensi kami, seperti tanpa henti.

Menurut saya, KPK adalah salah satu simbol utama harapan rakyat Indonesia. Banyak orang terzalimi, terpinggirkan, berharap KPK bisa membuat hidup mereka lebih baik. Ada kelas menengah berharap negeri yang maju dan mudah cari rejeki tanpa korupsi, dan semua lapisan masyarakat yang rindu akan cita-cita Reformasi 1998 terwujud.

Kami berusaha keras menumbuhkan harapan tersebut. Tujuh puluh lima orang dan ribuan pegawai KPK lainnya akan sekuat tenaga bertahan menghadapi gempuran ini. Koruptor dan pendukungnya yang harus enyah dari KPK, bukan kami yang sepenuh hati mencintai bangsa ini. Jangan ragukan praktik kebangsaan kami.

Menyemai Pendidikan di Mutiara Pasifik

Seabrek persoalan menghambat kualitas pendidikan di Morotai. Sejumlah terobosan ditempuh untuk memutus lingkaran stagnan itu. Kini langkah transformatif Benny Laos mulai menuai hasil.

Prasarana Laboratorium dan Perpustakaan SMP Negeri Unggulan 1 Pulau Morotai

Wajah-wajah ceria murid masuk sekolah menengah pertama (SMP) menghiasi pagi di Daruba, Pulau Morotai. Satu per satu tampak berhamburan keluar dari mobil antar-jemput gratis memasuki halaman SMP Teladan Satu, Kabupaten Pulau Morotai.

Kegiatan belajar di Morotai berjalan normal. Ruang kelas, laboratorium, dan gedung olah raga (GOR) sekolah tidak pernah sepi dari kegiatan dan interaksi para murid dengan guru-gurunya. Kondisi ini tidak luput dari strategi pencegahan wabah Covid-19 yang berjalan sesuai target.

Sejak pandemi, semua pendatang yang masuk lewat jalur laut dan udara diwajibkan untuk menjalani tes antigen dan PCR. Mereka yang positif Covid-19 harus menjalani karantina sampai dinyatakan negatif.

Kegiatan sekolah dan ujian kelulusan berjalan lancar karena penularan Covid-19 dapat dihindari, kata Firdaus Arsyad, guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan ekstrakulikuler komputer SMP Unggulan I, Daruba, medio April lalu.

Denyut pendidikan tersebut merupakan representasi dari lompatan transformasi yang berhasil dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pulau Morotai dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti lingkaran setan (*vicious circle*), berbagai persoalan tadinya membelenggu peningkatan pendidikan di Morotai.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kabupaten Morotai, Refi Dara, mengungkapkan bahwa seperti daerah di perbatasan yang lain, persoalan klasik di Morotai adalah terkait kompetensi para guru, kelayakan sarana dan prasarana, jumlah siswa, keterbatasan anggaran, dan sejumlah unsur yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pada Juni 2016, saat Refi menjabat sebagai Kadikbud, sebanyak 60% guru SD masih lulusan diploma 1 dan 2. Di setiap desa minimal ada satu SD dan setiap kecamatan memiliki satu hingga tiga SMP. Di Morotai total ada 50 SD dan 28 SMP.

Masih paradigm lama yang penting ada sekolah dan masuk sekolah, belum sampai pada proses, mutu, dan standar pendidikan yang harus dipenuhi, katanya.

Refi mengungkapkan, untuk SD jumlah siswa tidak ideal, karena banyak kelas yang hanya diisi lima-enam siswa saja. Dan ada beberapa SD yang gurunya kurang dari enam orang.

Dengan keterbatasan APBD, imbuh Refi, untuk mengangkat guru honorer, untuk meningkatkan sarana prasarana, untuk mengejar SNP akan sulit terlaksana dan pemda tidak berdaya.

Evaluasi Sesuai Alokasi APBD dan Realisasi SNP

Pada awal kepemimpinan Benny Laos dan Asrun Padoma sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morotai, medio 2017, demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, menurut Refi, kebijakan pendidikan dievaluasi total dengan mengacu pada alokasi pendidikan di APBD dan target realisasi SNP.

Setelah memetakan persoalan Bapak Bupati Benny meminta kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk melakukan sejumlah langkah solutif dengan cepat dan nyata, kata Refi.

Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melebur sejumlah SD dan SMP dalam radius 3-5 kilometer menjadi satu SD atau satu SMP. Bahkan, imbuh Refi, ada tujuh SMP yang digabung menjadi satu SMP.

Namun saat implementasinya banyak ditentang masyarakat serta memicu pro dan kontra. Kepala Sekolah SD Unggulan I, Didik Wahyudi, mengungkapkan penentangan datang dari orang tua, sejumlah praktisi pendidikan dan politisi.

Akan tetapi, dengan dasar yang kuat, terukur dan matang kebijakan tersebut tetap dijalankan. Setelah keberhasilan *pilot project* SD Unggulan I hasil penggabungan tiga SD di Daruba, ungkap Didik, dukungan mengalir deras. Justru setelah itu, banyak guru-guru SD

termotivasi untuk digabung menjadi SD-SD Unggulan.

Mereka perlu bukti. Dengan kebijakan itu murid senang, orang tua percaya dan para guru dapat memenuhi standar pendidikan seperti kelulusan, isi, proses, dan penilaian secara maksimal, katanya.

Didik mengisahkan bagaimana terbentuknya SD Unggulan I yang merupakan gabungan dari SD I, SD II dan SD Inpres. Kini total siswa SD Unggulan I menjadi 632 orang dengan didampingi 36 guru PNS, 11 guru tenaga kontrak daerah, dan tiga petugas *cleaning service*.

Sarana prasarana SD berubah total karena kini sudah ada ruang kelas satu lantai dan dua lantai, kantin, ruang bermain edukatif, GOR, lapangan futsal, basket, dan voli, perpustakaan, serta laboratorium. Lalu kegiatan belajar mengajar di kelas sudah memanfaatkan sarana IT dan multimedia.

Kini satu guru dibekali satu laptop untuk proses mengajar. Lalu murid kelas IV, V, dan VI sudah diajarkan memakai komputer. Untuk murid kelas I sampai III dapat memainkan *game-game* edukasi di sekolah, Didik memaparkan.

Didik berharap, lompatan nyata peningkatan SPN di Morotai terus didukung oleh pemangku kepentingan baik siswa, orangtua, pendidik, dinas, pemda, dewan, dan masyarakat, sehingga pendidikan makin maju dan bermutu.

Pendidikan Barbasis Digital dan Beasiswa Wajib Belajar 16 Tahun

Dukungan masyarakat agar anak menimba ilmu di sekolah, menurut Firdaus Arsyad, guru IPS dan ekstrakulikuler komputer SMP Unggulan I, sangatlah penting. Ia mengalami bagaimana di masa awal mesti harus jemput bola ke rumah-rumah untuk memotivasi murid dan orangtua guna mendukung pendidikan di sekolah.

Ketersediaan prasarana komputer dan IT, imbuh Firdaus, menjadi daya tarik bagi siswa untuk giat belajar. Apalagi ujian berbasis komputer untuk kelulusan siswa pada April lalu berjalan lancar, katanya.

Kadikbud Morotai, Refi, mengatakan bahwa perubahan yang terjadi tidak lepas dari visi dan misi pasangan Bupati-Wakil Bupati mewujudkan pendidikan bermutu demi membentuk insan Morotai yang cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia. Untuk itu, RPJMD Morotai disesuaikan dengan kemampuan APBD dengan melakukan *refocusing*, realokasi, inovasi program, merger, dan skala prioritas.

Saat ini, ungkap Refi, sebanyak 99% guru SD dan SMP sudah lulusan S1, untuk memenuhi

FOTO-FOTO: GATRA/ ADI WIJAYA

Implementasi Merdeka Belajar Berbasis IT di SD Negeri Unggulan 1 Pulau Morotai

poin E dari SPN, yakni standar tenaga pendidikan. Lalu pada tahun ini, target pembangunan 21 sekolah unggulan, terdiri dari 12 SD unggulan dan sembilan SMP unggulan, diharapkan sudah rampung.

Seluruh ruang kelas, kata Refi, selain memiliki toilet sendiri juga dilengkapi dengan sistem jaringan berbasis digital. Termasuk pemasangan CCTV dalam dua-tiga bulan ke depan, sehingga semua kegiatan akan terhubung dan dapat dipantau oleh kepala daerah dan dinas pendidikan dari ruang *command center* di kantor pemda.

Dengan merger sekolah, maka sejumlah persoalan seperti kekurangan guru, kecukupan jumlah murid, dan peningkatan sarana prasarana dapat teratasi, katanya.

Lalu, untuk mendukung kebijakan merdeka belajar berbasis pemanfaatan IT, menurut Refi, pada 2021 ini sebanyak 1.000 lebih laptop dan 1.000 lebih tablet dalam beberapa pekan ke depan akan dibagikan kepada para siswa. Tahun depan program satu siswa satu laptop atau tablet ini dilanjutkan sampai selesai, katanya.

Sementara itu, untuk siswa ada transportasi bus sekolah gratis. Bahkan Program sekolah gratis untuk wajib belajar 16 tahun untuk warga Morotai sudah dilakukan dari masuk SD sampai kuliah di Universitas Pasifik (Unipa) Deruba. Semua gratis dari pendaftaran, SPP, buku, magang sampai wisuda, kecuali seragam sekolah, kata Refi.

Demi mengejar kebutuhan SDM berkualitas, beasiswa juga diberikan kepada mahasiswa ber-KTP Morotai dan kuliah di sejumlah universitas negeri di luar Morotai. Refi mengatakan, beasiswa itu untuk yang mengambil pendidikan bidang kesehatan seperti kedokteran, farmasi, dan bidang kesehatan lainnya, serta pariwisata, pertanian, perikanan, dan bahasa Inggris.

Pemilihan jurusan tersebut sesuai dengan kebutuhan urgen dan fokus sektor pembangunan di Morotai ke depan. Sejak bergulir pada 2018 lalu, kini sudah 51 yang mendapat beasiswa dari Pemda Morotai. Kurang-lebih 30 orang mengambil bidang Kesehatan. Bahkan ada satu orang lanjut kedokteran ke RRT dengan IPK 3,5, kata Refi.

Refi mengungkapkan, kebijakan memberikan peluang pendidikan yang luas tidak lepas dari pengalaman Bupati Benny yang untuk sekolah menengah saja sempat tertunda karena kurang biaya. Dia berharap hal itu tidak terjadi pada generasi muda Morotai, karena kemajuan Morotai sangat tergantung pada generasi muda yang ulet, kompeten, dan berkualitas.

Itu salah satu visi beliau, ketika ada kesempatan dan biaya maka semua orang pasti bisa mewujudkan cita-citanya, dan itu menjadi salah satu keinginan pak Bupati untuk kita lakukan terus di bidang pendidikan, ujar Refi.

Bupati Benny Laos sendiri melihat bahwa kunci untuk mencapai kemajuan yang massif, khusus Morotai membutuhkan SDM yang berkualitas, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi ke depan.

Untuk peningkatan SDM proses pendidikan yang bermutu harus terwujud. Ini sangat dipertaruhkan, maka saya sepenuh hati dan semuanya harus mendukung total, katanya.

Benny mengungkapkan bahwa pada dasarnya kebijakan inovatif tersebut untuk memenuhi delapan unsur yang ada pada Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan alokasi pendidikan dalam APBD Morotai.

Sejumlah standar pendidikan terkait tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan harus direalisasikan sesuai dengan APBD. Ini akan paralel dengan terpenuhinya standar kualitas yang lain seperti isi, proses, penilaian dan kelulusan, pungkas Benny. ●

SUAP PENYIDIK KPK

Senayan dan Kuningan

KPK mulai fokus menyelisik dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dalam perkara suap Penyidik KPK. Di DPR, MKD akan memanggil semua pelapor yang mengadukan Wakil Ketua DPR RI itu. Meski sudah siapkan bantuan hukum, belum ada keputusan dari Golkar.

Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti seusai melakukan penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPR

Pertemuan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dengan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin lalu itu terkesan disembunyikan dari publik. Meskipun agenda pertemuan ini adalah pemeriksaaan kepada Azis oleh Dewas, tak ada pemberitahuan resmi soal ini. Apalagi kabarnya Azis dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik seorang Penyidik KPK, Stefanus Robin Pattuju, kasus yang oleh KPK juga sedang diusut keterlibatan Azis di dalamnya.

Belakangan, salah seorang Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris, membenarkan pemanggilan ini. "Iya benar, tadi pagi," katanya. Namun ia tak tahu materi pemeriksaan yang diajukan Dewas, karena tak ikut terlibat dalam pemeriksaan. Memang, selain penanganan tindak pidana, KPK juga melaporkan mantan Penyidik KPK, Stefanus, ke Dewan Pengawas, atas

Membidik Azis

Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA

dugaan pelanggaran etik.

Adapun keterlibatan Azis dalam kasus ini, memang masih didalami. Sejak disebut-sebut dalam persidangan kasus *red notice* Djoko Tjandra, kini politisi Partai Golkar itu harus berhadapan dengan upaya penyidikan dugaan suap KPK. Kasus yang bermula dari dugaan suap lelang jabatan di Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara ini, kemudian meluas menjadi arena pertemuan antara Penyidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial, di kediaman Azis.

Singkat cerita, KPK pun melakukan penggeledahan di tiga properti dan kantor Azis di DPR. Hasilnya, KPK mendapatkan barang bukti baru terkait keterlibatan Azis dalam skema penyuapan Penyidik KPK agar kasus ini dipetisikan.

> "Selanjutnya, bukti ini akan segera dilakukan validasi serta verifikasi untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara dimaksud."
>
> Ali Fikri

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa dalam proses penggeledahan, ada beberapa barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang disidik KPK. "Selanjutnya, bukti ini akan segera dilakukan validasi serta verifikasi, untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara dimaksud," katanya melalui pesan singkat ke GATRA.

Dugaan keterlibatan Azis di perkara suap ini makin menguat. Terlebih ketika Azis menolak hadir dalam agenda pemeriksaan saksi yang digelar pada Jumat, 7 Mei lalu. Ali mengatakan, peran Azis tentu akan didalami sambil berjalannya penyidikan. KPK memang belum mau terbuka atas kasus ini.

***

Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di Senayan juga belum ada keputusan terkait nasib Azis. Meski sudah ada lima laporan masyarakat terkait tindak tanduk Azis yang dinilai sudah melewati batas etis, MKD masih mengulur waktu untuk memanggil Azis.

Ketua MKD DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan bahwa ada beberapa masukan yang cukup menarik terkait nasib Azis di parlemen. Dari kelima laporan tersebut, tiga sudah masuk dalam pembicaraan rapat pleno MKD yang digelar pada Selasa, 18 Mei 2021. "Alhamdulillah, sudah masuk banyak ajuan, laporan dari beberapa lembaga. Kita akan melakukan penyelidikan dengan waktu yang kita rencanakan, dan ini akan berjalan secepatnya," ujarnya kepada wartawan termasuk GATRA, di depan ruang MKD DPR RI pada Selasa, 18 Mei 2021.

Dalam rapat pleno, MKD memutuskan untuk memanggil semua saksi dan pelapor. Hal ini penting untuk menilai persoalan ini secara berimbang. Setelah semua saksi dan pelapor rampung, MKD baru akan memanggil Azis. "Kita tidak akan memanggil Pak Azis Syamsuddin dahulu sebelum selesai klarifikasi dengan pelapor. Jadi, ikuti saja [perkembangan para pelapor]. Jangan memasuki wilayah substansi," ujarnya.

GATRA/ARDI WIDI YANSAH

"Kami tidak akan intervensi hukum, *tapi* bicara etika tentang *gimana* seorang Anggota DPR bisa bersikap dan berperilaku ke dalam dan keluar."

Junimart Girsang

Anggota MKD lainnya, Junimart Girsang, menjelaskan bahwa dalam rapat itu, ada 17 anggota MKD yang hadir, baik fisik maupun virtual. Secara menyeluruh, ada sembilan laporan masyarakat terkait kelembagaan DPR RI. "Kita akan minta tenaga ahli, apakah sudah memverifikasi laporan tersebut. Kalau sudah, maka hasil verifikasi akan kami bawa pada rapat MKD," ucapnya.

Terkait nama Azis, Junimart meminta MKD untuk mendahulukan persoalan ini. Menurutnya, desas-desus kasus Azis perlu diverifikasi secepatnya. "Kita tidak mau desas-desus dan berita mengenai Azis menjadi bias," katanya.

Meski demikian, MKD juga tidak bisa mengintervensi persoalan hukum yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Artinya, Azis tidak akan dipanggil untuk menjelaskan persoalan di KPK. "Kami tidak akan intervensi hukum, *tapi* bicara etika tentang *gimana* seorang Anggota DPR bisa bersikap dan berperilaku ke dalam dan keluar," katanya.

Bukan sekali dua kali Azis disorot persoalan hukum. Selain persoalan *red notice* Djoko Tjandra baru-baru ini, Azis juga pernah dilaporkan ke MKD atas dugaan pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah pada 2017 lalu. Wakil Ketua DPR RI ini pernah disebut dalam

persidangan Djoko Susilo terkait korupsi pengadaan simulator SIM.

Nama politisi Golkar ini juga pernah muncul di dokumen pengeluaran Grup Permai yang dimiliki Nazaruddin. Setidaknya, ada dua kali nama Azis, yang diduga kuat merujuk pada Azis Syamsuddin, disebut dalam dokumen itu. Dalam kasus ini, Azis diduga membantu Nazaruddin dalam proyek pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan.

Dalam dokumen tanggal 24 April 2010, tercatat dua kali pengeluaran untuk "Azis". Pengeluaran pertama dibukukan dengan keterangan "All Azis" dengan rincian US$250.000 untuk anggota Komisi Hukum DPR dan US$50.000 sebagai jatah Azis. Pengeluaran kedua, tertulis keterangan AS, Alwy, dan Olly, sebesar US$500.000. Pada hari yang sama, tercatat pengeluaran untuk "Olly" sebesar US$500.000.

Sebelumnya, meski banyak disebut-sebut, Azis belum pernah sekalipun masuk dalam surat perintah penyidikan, baik dari Kepolisian maupun KPK. Namun kali ini, tampaknya KPK sudah mulai menajamkan penyelidikan ke Azis usai penggeledahan.Bahkan KPK sudah meminta pihak Imigrasi mencekalnya bepergian ke luar negeri. GATRA sudah mencoba mengklarifikasi ke Azis, tetapi ia belum memberikan jawaban.

GATRA telah menghubungi Azis Syamsuddin melalui telepon seluler dan layanan *whatsapp*, namun yang bersangkutan tidak menjawab permintaan wawancara hingga laporan ini dituliskan.

Meski banyak disebut-sebut, Azis belum pernah sekali pun masuk dalam surat perintah penyidikan, baik dari Kepolisian maupun KPK.

***

Adapun Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar, Supriansa, mengatakan bahwa ia ditugaskan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk melakukan pengawalan terhadap kasus yang menimpa kolleganya tersebut. "Tentu, kita mengedepankan asas praduga tak bersalah pada kasus yang menimpa Pak Azis ini," ucap Supriansa beberapa waktu lalu di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

GATRA/EVA AGRIANA ALI

Azis Syamsuddin

Untuk sementara, Supriansa masih perlu berkomunikasi lebih jauh dengan Azis. Terlebih, hingga sekarang Azis belum memiliki kuasa hukum. "Tentu Pak Azis akan menyiapkan pengacara nanti. Nah, nanti pengacaranya akan berkomunikasi langsung dengan saya terkait dengan masalah yang dihadapi beliau," ujar Anggota Komisi III DPR tersebut.

Meski demikian, Supriansa siap mengawal persoalan yang menjerat Azis. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Azis. "Nanti, lihat kapan lagi kira-kira panggilan berikutnya oleh KPK. Nanti kita infokan persiapan-persiapan oleh Bakumham kepada Azis Syamsuddin," katanya.

Supriansa memang tidak menjelaskan detail komunikasinya dengan Azis. Ia berkelit hanya mengetahui status hukum Azis sebagai saksi. Pada posisi ini, Supriansa tetap menunggu persiapan yang akan dijalani oleh Azis. "Ke depan, nanti kita akan menunggu seperti apa persiapan-persiapan yang diberikan Pak Azis oleh pengacaranya nanti dalam menanggapi masalahnya," katanya.

Namun, bantuan hukum dari Golkar tetap tergantung dari keputusan Azis. Jika merasa sudah cukup dengan tim kuasa hukumnya, Bakumham Golkar akan mundur.

Untuk persoalan di parlemen, Supriansa menekankan agar publik bersabar menunggu kepastian dari MKD. Fraksi Golkar di DPR tentu memiliki mekanisme tersendiri untuk menyikapi persoalan Azis. "Ya apa pun nanti keputusan hukum, keputusan di MKD, keputusan diproses hukum di luar. Ke semuanya nanti akan kita respons dengan baik nantinya," ucap Supriansa.

ADITYA KIRANA, M. GURUH NUARY, DAN WAHYU WACHID ANSHORY

INSTAGRAM/ NADIEMMAKARIM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset Teknologi Nadiem Anwar Makarim bersama Megawati Soekarnoputri

PERATURAN PEMERINTAH

Dua Sandungan Mas Menteri

Menteri Nadiem dihujat karena tidak mencantumkan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai muatan pelajaran dalam kurikulum. Polemik kamus sejarah ikut meningkatkan kritikan ke Nadiem.

Perbincangan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset Teknologi Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, Senin sore pekan lalu, masih menggantung. Keduanya bertemu di kantor Kemenkumham, Jakarta, membahas tentang peleburan kembali Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan polemik pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia.

Supaya tuntas, besoknya, Nadiem yang kerap disapa Mas Menteri ini bertandang ke rumah kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di rumah itu, selama dua jam, Megawati ditemani Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan Yasonna, berbincang dengan Nadiem. Usai pertemuan, tak lupa, Nadiem berswafoto dengan Megawati untuk mengabadikan safari politiknya. Foto itu diunggah Nadiem di akun media sosial miliknya.

Nadiem mengaku, salah satu topik yang dibahasnya dengan Megawati adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Baru diterbitkan akhir Maret lalu, beleid itu langsung menuai respons penolakan dari masyarakat.

Musababnya, isi PP itu tidak mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia dan Pancasila masuk dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Pasal 40 ayat (2) dan (3) di PP itu tertulis, kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi tidak wajib memuat pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia.

Kepada Nadiem, Megawati menyampaikan kegelisahannya jika pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia tidak masuk kurikulum. Karena, menurut Megawati, Pancasila adalah dasar, ideologi dan kepribadian bangsa Indonesia.

"Sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," ujar pemilik nama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri itu.

Sebelum bertemu Megawati, Nadiem sebenarnya sudah bersurat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menyetujui revisi PP SNP. Dalam suratnya, Nadiem meminta agar pasal 40 diperbaiki.

Salah satu klausul yang direvisi Nadiem, yaitu pelajaran Pancasila wajib dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. "Saya setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukkan dalam revisi PP 57 Tahun 2021," kata Nadiem.

Merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menjadi acuan PP SNP, Pancasila memang belum menjadi mata pelajaran tersendiri.Alasannya, muatan mengenai Pancasila sudah tertuang di pendidikan Kewarganegaraan.

Persoalan muncul ketika PP SNP tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). Di Pasal 35 ayat (3) UU PT disebutkan, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila.

UU PT inilah yang dijadikan sebagai acuan bahwa PP SNP yang diteken Presiden Jokowi dianggap telah menghilangkan pelajaran Pancasila dari kurikulum pendidikan. Karena itu pula, berembus kabar kursi menteri Nadiem hampir berpindah karena terkena *reshuffle*. Meskipun belakangan posisi Nadiem sebagai menteri masih ajek.

Kajian Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menemukan bahwa beleid PP SNP butuh penyempurnaan. Karena Pancasila belum benar-benar tertulis secara langsung di beleid tersebut.

Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, Kasiyarno, mengusulkan agar nomenklatur mata pelajaran atau kuliah pendidikan kewarganegaraan diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). "Jika perlu Pan-

INSTAGRAM/ NADIEMMAKARIM

Nadiem Anwar Makarim bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siradj

> "PP SNP sudah sesuai dengan UU Sisdiknas. Di UU itu, Pancasila dan Bahasa Indonesia juga tidak tertuang secara eksplisit."
>
> Mohammad Abduhzen

casila menjadi mata pelajaran tersendiri," katanya.

Masih dari kajian PP Muhammadiyah, Kasiyarno menambahkan bahwa Bahasa Indonesia juga belum tertuang jelas di PP SNP. PP Muhammadiyah mengusulkan agar bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dan bahasa pemersatu bangsa.

Menurut Kasiyarno, PP SNP bukannya memperbaiki PP sebelumnya. Tapi sebaliknya, PP tersebut justru mereduksi PP sebelumnya yang lebih komprehensif, detail, dan gamblang. "PP 57 [PP SNP] ini justru minimalis dan tidak sesuai dengan perundangan yang lebih tinggi," katanya.

Berbagai kalangan pun mendesak agar Presiden Jokowi segera meneken revisi PP SNP. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, misalnya menilai hilangnya mata pelajaran pendidikan Pancasila terjadi sejak diberlakukannya UU Sisdiknas.

Padahal, politisi Partai Golkar itu melanjutkan, sebelum ada UU Sisdiknas di 2003, pendidikan Pancasila menjadi pelajaran wajib sejak tahun 1975. "Hal itu tidak lepas dari peran MPR RI melalui Ketetapan MPR 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983," ujarnya.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono, juga tidak habis pikir dengan tidak dicantumkannya Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum. Padahal, Haryono mengungkapkan, tadinya pemerintah akan mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran atau kuliah tersendiri, di kurikulum pendidikan. "Ini justru muncul PP kontroversial," katanya.

***

Belum selesai polemik PP SNP, Nadiem kembali diterpa persoalan tidak sedap. Kementerian yang dipimpinnya dituding sengaja menghilangkan nama tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) dari kamus sejarah Indonesia. Seperti K.H. Hasyim Asy'ari, yang tercatat sebagai Pahlawan Nasional dan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang merupakan presiden keempat RI.

Tentang polemik kamus sejarah Indonesia, Nadiem angkat suara. Menurutnya, kamus tersebut disusun sejak 2017. Kala itu menterinya masih Muhadjir Effendy. Kini Muhadjir menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). "Kamus sejarah disusun 2017 sebelum saya menjabat," ujar Nadiem.

Muhadjir mengamini pernyataan Nadiem. Meski demikian, Muhadjir mengaku baru tahu persoalan ini setelah ramai di publik. Muhadjir mendapat laporan dari Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, bahwa kamus tersebut masih draf dan masih perlu dikoreksi.

Persoalannya, yang mengurus proyek ini di awal adalah Direktorat Sejarah pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sementara itu, Direktorat Sejarah saat ini sudah dibubarkan. Sehingga upaya perbaikan kamus sejarah menjadi mandek. "Tapi yang penting sekarang segera dicari jalan keluarnya," ujar Muhadjir.

Muhadjir meminta Nadiem membentuk tim investigasi untuk mengusut persoalan tersebut. "Kalau persoalan itu dipandang serius, sebaiknya Kemendibud membentuk tim investigasi internal. Toh, meskipun direktoratnya sudah bubar kan orang orangnya masih ada," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Dari informasi yang diperoleh GATRA, pada 2017,

Muhadjir Effendy

GATRA/ ARDI WIDIYANSAH

Direktorat Sejarah berencana membuat *Kamus Sejarah Indonesia Jilid I Nation Formation (1900-1950)* dan *Jilid II Nation Building (1945-1998)*. Meski masih dalam bentuk draf, *Kamus Sejarah Indonesia* ini sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Di *Kamus Sejarah Indonesia Jilid I* yang berisi tentang tokoh-tokoh sejarah Nasional inilah, nama K.H. Hasyim Asy'ari dan Gus Dur tidak tercantum.

Hasil penelusuran Gerakan Kebangsaan NKRI —sebuah organisasi masyarakat yang peduli dunia pendidikan—menemukan bahwa penyusunan *Kamus Sejarah Indonesia* dilaksanakan ketika Direktur Sejarah dijabat Triana Wulandari. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembuatan kamus ini adalah Kasubdit Sejarah Nasional Amurwani Dwi Lestariningsih. Namun, medio Agustus 2017, Amurwani diganti oleh Suharja.

Koordinator Gerakan Kebangsaan NKRI, Arief Rasyad, menduga bahwa peralihan ini menjadi penyebab pengawasan pembuatan kamus sejarah ini terabaikan. "Anggaran untuk kegiatan tersebut diketahui diambil dari Program Penulisan Pengayaan Bahan Ajar Sejarah untuk Guru Sejarah," katanya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Arief, Direktur Sejarah menetapkan tim penulis yang terdiri dari para akademisi di beberapa perguruan tinggi, sejarahwan dan pihak penerbit. Naskah kemudian disusun penulis, lalu diserahkan kepada editor dan narasumber untuk diperiksa dari segi substansi sejarah dan kaidah penulisan.

Arief menerangkan, publikasi naskah kamus sejarah ini sebenarnya masih berbentuk draf dan belum layak terbit. "Masih perlu dikoreksi, tapi bisa langsung dipublikasikan di laman rumah belajar Kemendikbud," katanya.

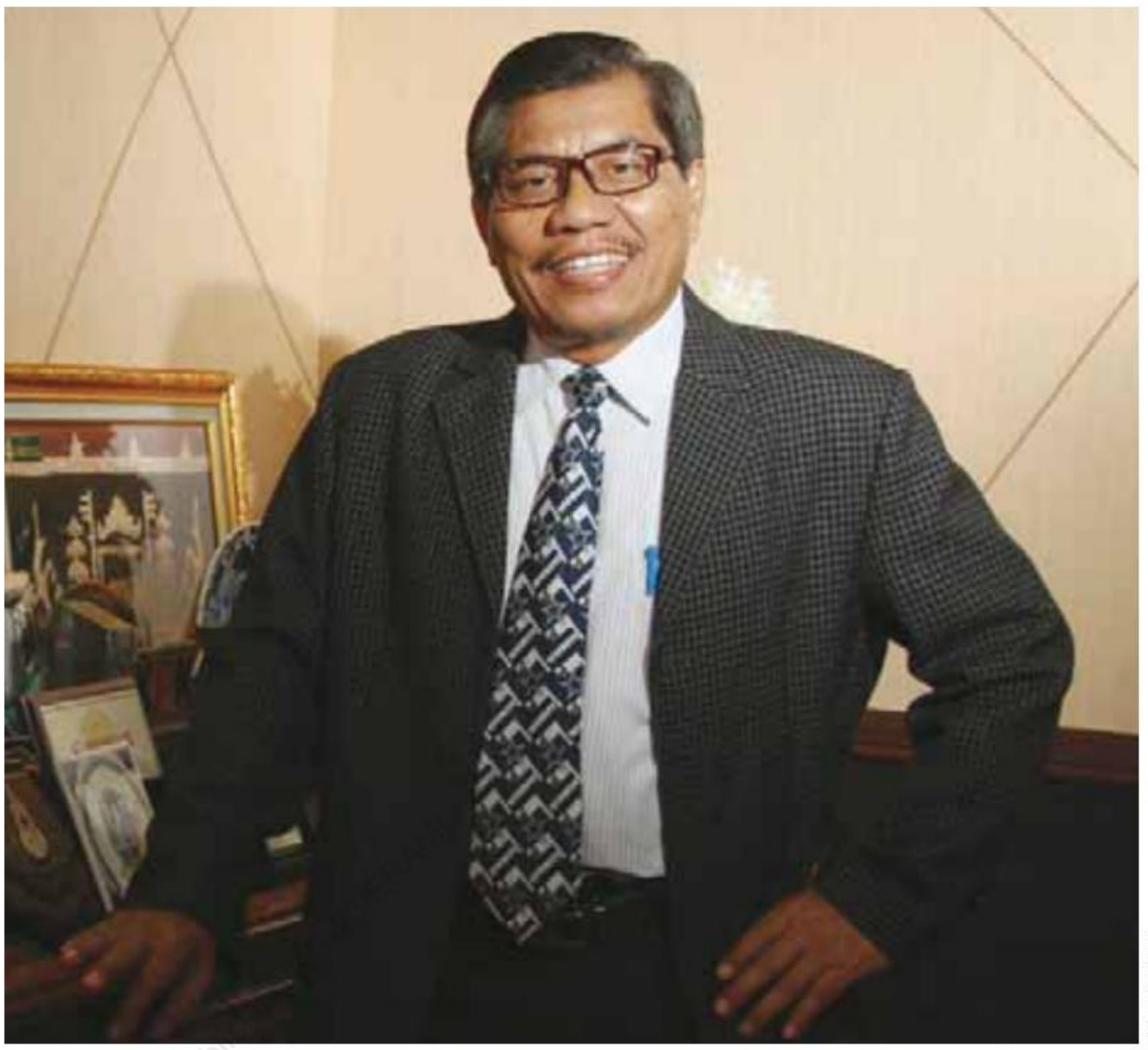

DOK.UAD.AC.ID

Kasiyarno

Belajar dari pengalaman, Arief mengingatkan agar pejabat di Kemendikbud-ristek tidak lagi bermental proyek. Menurut Arief, Kemendikbud tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. "Direktorat Jenderal Kebudayaan tidak cukup hanya meminta maaf, harus segera dibentuk tim investigasi, melakukan evaluasi yang komprehensif," katanya.

Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen menilai PP SNP sudah sesuai dengan UU Sisdiknas. Di UU ini, Pancasila dan bahasa Indonesia memang tidak tertuang secara eksplisit sebagai mata pelajaran. Kalaupun ada desakan untuk direvisi, itu lebih karena adanya tekanan dari masyarakat. "Pemerintah mungkin beranggapan daripada bikin gaduh berpolemik, lebih baik direvisi," ujarnya.

Sementara itu, mengenai tidak dicantumkannya nama K.H. Hasyim Asy'ari dan Gus Dur di Kamus Sejarah, Abduhzen menilai bahwa tim penulis tidak serius menyusun kamus tersebut. "Kemungkinan kurang persiapan dan studi dalam menyusun kamus itu. Jadi asal-asalan, atau mau kejar tayang banget. Tim pembuatnya harus menjelaskan secara terbuka tentang hal itu," ujarnya.

Menurut Abduhzen, tidak masuknya dua nama tokoh NU di kamus sejarah adalah kesalahan fatal. "Kalau karena kebodohan, suruh saja sekolah lagi. Atau kalau karena kelalaian suruh pensiun dini saja," ujar akademisi dari Universitas Paramadina itu kepada GATRA.

HENDRY RORIS SIANTURI

TIMUR TENGAH

Dunia Mengutuk Ag

Serangan tentara Israel di wilayah Gaza, Palestina

resi Militer Israel

Meningkatnya agresi militer Israel di Palestina telah menewaskan ratusan jiwa. Bibit pertikaian yang tak berkesudahan berpotensi memunculkan kembali perlawanan Intifada. Banyak negara mengutuk agresi militer Israel yang mematikan.

YOUSEF MASOUD / SOPA IMAGES/SIPA USA

Puluhan jet tempur Israel membombardir wilayah Gaza, Palestina, dan menghancurkan rumah-rumah penduduk serta infrastruktur lainnya. Dalam semalam, militer Israel menjatuhkan 450 rudal di Jalur Gaza, Minggu, 16 Mei lalu. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyiagakan 9.000 tentara cadangan di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut. Agresi militer Israel pada hari itu adalah yang paling mematikan sejak pecahnya pertikaian Israel dan Palestina lebih dari sepekan lalu.

Diperkirakan, IDF telah meluncurkan lebih dari 600 serangan udara dan meruntuhkan lebih dari tiga blok apartemen di Gaza. IDF menyebutkan bahwa serangan ini tidak akan dihentikan selagi warga Palestina dan Partai Hamas tidak berhenti untuk menyerang wilayah Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merestui serangan udara tersebut. Ia menuding Hamas yang memulai perang dengan menembakkan roket ke wilayah negaranya. "Pihak yang menanggung rasa bersalah atas konfrontasi ini bukanlah kita, itu adalah mereka yang menyerang kita," ujarnya seperti dikutip dari *Al Jazeera*.

Akibat konflik berdarah ini, Kementerian Kesehatan, Palestina di Gaza menyebut jumlah korban tewas di wilayah dengan dua juta penduduk itu kini mencapai lebih 200 jiwa. Sementara itu, *Reuters* melaporkan, per tanggal 17 Mei sebanyak 197 warga Palestina meninggal akibat serangan yang terjadi, 58 di antaranya adalah anak-anak serta 34 wanita, dan 1.230 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah mengingat Israel terus menggencarkan serangan.

Tidak sedikit negara yang mengecam dan menyebut agresi militer Israel tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Ribuan demonstran di sejumlah kota di Amerika Utara dan Eropa menggelar aksi solidaritas membela Palestina. Di Kanada, misalnya, pengunjuk rasa menyerukan Israel mengakhiri serangan. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan membawa poster yang menuduh Israel melanggar hukum internasional. Unjuk rasa juga berlangsung di kota-kota di Amerika Serikat, termasuk New York, Boston, Washington, Montreal, Philadelpia, Atlanta, dan Michigan.

Di Washington, pada Jumat, 14 Mei lalu, para pengunjuk rasa pro Palestina berhamburan ke jalan secara

MYKHAYLO PALINCHAK/123RF.COM

serentak dan memadati Monumen Washington. Mereka mengepalkan tangan tanda protes dan menjunjung poster bertulisan "Merdeka Palestina" sambil meneriakkan "Panjang Umur Intifada". Salah satu pengunjuk rasa meneriakkan agar Presiden Joe Biden tidak mendukung Israel dan membantu korban di Palestina. "Saya memberitahu Presiden Biden dan kabinetnya berhenti mendukung pembunuhan. Dukung para korban, hentikan penindasan," ucap seorang pengunjuk rasa.

Tak hanya di Amerika, aksi solidaritas terhadap Palestina juga berlangsung di beberapa wilayah di Eropa. Di Berlin dan kota-kota Jerman lainnya seperti Frankfurt, Leipzig, dan Hamburg ribuan orang berdemo. Pengunjuk rasa meneriakkan "boikot Israel" dan melemparkan batu dan botol ke arah polisi. Dalam aksi demo tersebut beberapa orang ditangkap.

Sementara itu, di London, 150.000 pengunjuk rasa melakukan *long march* menuju Kedutaan Besar Israel. Mereka juga membawa poster bertulisan tuntutan untuk menghentikan pengeboman Gaza, sambil meneriakkan "Bebaskan Palestina". Mengetahui aksi solidaritas tersebut. Duta Besar Palestina untuk Inggris Husam Zomlot mengatakan di hadapan pengunjuk rasa bahwa Palestina sudah muak dengan penindasan. "Kali ini berbeda. Kali ini kami tidak akan disangkal lagi. Kami bersatu. Kami sudah muak dengan penindasan," ujarnya.

Sejumlah pihak khawatir, gejolak konflik yang makin memanas di Gaza dapat berimbas pada munculnya Intifada ketiga. Gelagat tersebut sudah mulai terlihat sejak bibit konflik dan adu kekuatan digencarkan sejak Ramadan lalu. Hingga kini tidak ada tanda-tanda Israel dan Hamas bersedia untuk menghentikan konflik. Israel bahkan meningkatkan intesitas serangan.

Netanyahu secara terbuka bahkan mengatakan akan memperluas serangan militernya. Sedangkan Hamas dengan tegas menyerukan dilancarkannya intifada dalam skala penuh. Intifada terakhir, yakni Intifada kedua, dilakukan pada tahun 2000 dan berlangsung selama lima tahun, dengan korban jiwa hampir 5.000 orang.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memberikan gambaran kuat tentang dukungan negaranya terhadap aksi Israel di Tepi Barat dan kawasan kota lama. Biden diketahui sempat menghubungi Netanyahu terkait konflik tersebut mengatakan Israel berhak mempertahankan diri. "Israel memiliki hak untuk membela diri," kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari *Reuters*.

Biden juga mengutuk serangan roket oleh Hamas dan kelompok lain terhadap sasaran di Israel. Ia mengatakan bahwa tim keamanan nasionalnya sering melakukan kontak dengan rekan-rekannya di Israel, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut. "Menyampaikan dukungan yang tak tergoyahkan untuk keamanan Israel dan hak sah Israel untuk membela diri dan rakyatnya, sekaligus melindungi warga sipil," ia memaparkan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menyerukan agar pertempuran Israel dan Palestina berakhir. Guterres mengutuk kekerasan terhadap warga Palestina. Menurutnya, perang ini berpotensi membuat krisis keamanan dan kemanusiaan yang tak tertahankan dan menumbuhkan ekstremisme. "Siklus pertumpahan darah, teror dan kehancuran yang tidak masuk akal ini harus segera dihentikan," ujarnya.

Guterres juga mengaku terganggu oleh serangan udara Israel ke gedung Al-Jala di Kota Gaza, yang menampung beberapa kantor media internasional, di antaranya *Al Jazeera TV*, *The Associated Press*, Mayadeen Company for Media Services, stasiun radio *Voice of Prisoners*, dan Doha Media Center. Bangunan 13 lantai yang menjadi sasaran rudal Israel adalah salah satu bangunan bertingkat tertua di Gaza. Guterres mengingatkan semua pihak bahwa setiap penargetan warga sipil dan organisasi media melanggar hukum internasional.

Serangan yang dilakukan oleh Israel tiap harinya juga mendapat kutukan dari negara-negara muslim. Pada Minggu, 16 Mei lalu, Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri dari 16 negara anggota OKI melakukan pertemuan virtual membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef dan jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang menghadiri pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial di dunia ini. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh pendudukan oleh Israel. "Indonesia mengecam keras semua tindakan yang dilakukan oleh Israel," ujar Retno.

Sebelumnya, Retno melanjutkan, ia dan beberapa menteri luar negeri dari negara lain telah berkomunikasi dan bertukar pikiran mengenai berbagai forum dan mekanisme internasional yang dapat digunakan untuk membantu Palestina dan meredakan situasi ketegangan saat ini. Retno menekankan pentingnya pengaruh dari setiap masing-masing anggota OKI untuk menghentikan kekerasan dan upaya de-eskalasi dilakukan dan gencatan senjata dapat dilakukan.

Di hadapan anggota OKI, Retno mengatakan tiga pemimpin negara di Asia Tenggara, yaitu Presiden RI, PM Malaysia, dan Sultan Brunei Darussalam, telah sepakat untuk mengeluarkan *joint statement* mengenai sikap ketiga negara terhadap situasi Palestina saat ini. "Keadilan harus tercipta bagi rakyat Palestina. Ketiga negara ini juga menyuarakan kepada komunitas internasional untuk menghentikan aksi kolonial dan segregasi rasial Israel," kata Retno.

RIANA ASTUTI

KEMLU.GO.ID

"Indonesia mengecam keras semua tindakan yang dilakukan oleh Israel."

Retno Marsudi

JEPANG

Jepang Siap Buang Limbah Nuklir ke Laut

Jepang berencana mengalirkan jutaan ton air limbah olahan PLTN Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Negara-negara tetangga protes dan menolak rencana itu. Zat radioaktif sisa dari PLTN Fukushima kira-kira sepersepuluh dari radiasi yang dilepaskan oleh bencana nuklir Chernobyl tahun 1986.

Jepang mengumumkan akan mengalirkan 1,25 juta ton air limbah olahan yang terkontaminasi oleh pembangkit llistrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang rusak ke Samudra Pasifik. Perdana Menteri Yoshihide Suga pada Selasa, 13 April lalu mengatakan tindakan itu sebagai cara terbaik untuk menangani tritium dan melacak jumlah radionuklida lain di dalam air. "Mengalirkan air yang diolah ke laut adalah solusi yang realistis. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kondisi air limbah jauh di atas standar keamanan," ucapnya di sesi pertemuan kabinet yang mendukung rencana tersebut.

Digital Publishing/KG-23/ERAMI

REUTERS/IAEA PHOTO

Petugas dari International Atomic Energy Agency (IAEA) saat memeriksa Reaktor Nuklir Fukushima di Jepang

Seorang pejabat pemerintah Jepang kemudian mengklarifikasi kepada *Sciencemag* bahwa rincian pengaliran perlu dikerjakan dan disetujui terlebih dulu. Secara bertahap, sejumlah uji coba pengaliran dapat dimulai dalam dua tahun mendatang. Dengan demikian butuh waktu sekitar 40 tahun untuk menyelesaikan pengaliran limbah olahan tersebut.

Rencana Jepang itu menuai protes dari negara-negara tetangga. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Chung Eui-yong, mengatakan Seoul menginginkan transparansi dan bukti dari Jepang bahwa jutaan ton limbah itu akan diperlakukan sesuai dengan standar Badan Energi Atom Internasional (IAEA), untuk menghilangkan bahan kimia berbahaya. Jutaan ton limbah itu akan dibuang dalam dua tahun di lepas pantai timur Korea.

Beijing mengkritik keputusan Tokyo sebagai sangat tidak bertanggung jawab, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan laut dan kesehatan manusia. Namun pihak Xi Jinping belum menguraikan langkah konkret lebih lanjut terhadap Tokyo.

Sementara itu, Rusia mengekspresikan keprihatinan besar tentang keputusan Jepang. Mereka meminta Tokyo untuk memberikan lebih banyak data tentang rencana pembuangan air olahan limbah itu. Di sisi lain, Taiwan mengatakan memiliki keprihatinan yang kuat tentang keputusan Jepang, atas nama rakyat Taiwan dan organisasi lingkungan. Negara-negara di Kepulauan Pasifik juga mendesak Jepang untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Para analis menyimpulkan, negara-negara kawasan akan fokus untuk menekan Tokyo agar segera menangani rencana pembuangan airnya, alih-alih mengorbankan hubungan bilateral dalam lingkungan geopolitik yang sudah tidak pasti.

Jepang, menurut *South China Morning Post*, adalah salah satu mitra dagang terbesar di Asia dan telah memperkuat hubungan politik, keamanan, dan ekonomi dengan negara-negara kawasan, banyak di antaranya memandang Tokyo sebagai sekutu yang bersahabat dan dapat diandalkan.

Kelompok industri dan ilmuwan nuklir mengatakan, PLTN lain telah membuang air limbah dengan cara ini dan ternyata dampaknya minimal. Tetapi kelompok lingkungan, orga-

AHN YOUNG-JOON/POOL VIA REUTERS

Chung Eui-yong

Kekhawatiran atas ikan yang terkontaminasi zat radioaktif menghancurkan industri perikanan Fukushima.

nisasi perikanan, dan negara-negara tetangga Jepang kompak mengutuk keputusan itu. Alasan utama mereka ialah soal banyaknya sisa limbah yang dialirkan ke laut. Ilmuwan kelautan mengungkapkan keprihatinan tentang kemungkinan dampak negatif pengaliran itu terhadap kehidupan laut dan perikanan.

***

Pengumuman pengaliran ini sesungguhnya sudah lama diduga. Tiga reaktor nuklir di PLTN Fukushima mengalami kehancuran setelah gempa bumi dan tsunami pada 11 Maret 2011. Puing-puing bahan bakar yang meleleh membakar melalui perkakas penahan baja dan masuk ke dalam dasar beton gedung reaktor. Sejak saat itu, para pekerja memompa air melalui reruntuhan untuk mencegah puing-puing menjadi terlalu panas dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Mereka juga mengumpulkan semua air yang terkontaminasi. Kini, air terkontaminasi itu tersimpan di lebih dari 1.000 tangki baja di area Fukushima.

Satu-satunya pilihan praktis untuk membuang air adalah mengalirkannya ke laut, juga melepaskannya dalam bentuk uap. Kedua cara ini telah diuji coba sebelumnya. Demikian kesimpulan komite penasihat pemerintah yang terdiri dari akademisi dan perwakilan kelompok warga pada Februari 2020.

PLTN di seluruh dunia diketahui secara teratur mengalirkan air olahan limbah yang mengandung sejumlah kecil tritium di bawah kondisi yang dipantau dan dikendalikan. Metode penguapan dilakukan terhadap sekitar 9.000 ton air yang terkontaminasi akibat kecelakaan di Stasiun PLTN Pulau Tiga Mil pada Maret 1979. "Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menganggap opsi pembuangan sebagai metode yang layak dilakukan baik dari segi teknis serta sejalan dengan praktik internasional," ujar Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, ketika mengunjungi Fukushima pada Februari 2020.

Adalah Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) yang dipercaya untuk mengolah air sisa limbah PLTN Fukushima. Perusahaan tersebut menjalankan air melalui rantai filter rumit yang disebut sebagai *advanced liquid processing system* (ALPS). Metode ini akan menangkap 62 jenis radionuklida, tetapi tidak termasuk tritium (isotop radioaktif hidrogen) dengan waktu paruh 12,3 tahun yang terjadi secara alami dalam jumlah kecil di air laut dan atmosfer. Tritium sangat sulit untuk dihilangkan karena atom ini menggantikan atom hidrogen dalam molekul air.

Mengingat tritium hanya memancarkan partikel beta berenergi rendah, maka risiko kesehatan yang ditimbulkannya sangat kecil. Korporasi berencana untuk mengencerkan air sampai konsentrasi tritium menjadi seperempat puluh dari yang diizinkan Jepang dalam kandungan air minum.

"Meskipun terdengar mengerikan, mengalirkan air limbah olahan ke Samudra Pasifik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan mengencerkan limbah olahan, radioaktivitas dapat dikurangi ke tingkat yang aman. Ke jumlah yang sebanding dengan eksposur dari pencitraan medis dan perjalanan udara," sebut seorang ilmuwan bahan nuklir di Curtin University, Nigel Marks, dalam pernyataan yang dirilis oleh Pusat Media Sains Australia.

Tetapi, selain tritium, isotop yang lebih berbahaya dengan masa hidup radioaktif yang lebih lama, seperti rutenium, kobalt, strontium, dan plutonium, terkadang lolos dari proses ALPS. Fakta ini baru diakui TEPCO pada 2018 lalu. Perusahaan tersebut sekarang mengatakan nuklida tambahan ini ada di 71% dari tangki." Isotop radioaktif ini ber-

"Mengalirkan air yang diolah ke laut adalah solusi yang realistis. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kondisi air limbah jauh di atas standar keamanan."

Yoshihide Suga

TSUNODA/AFLO VIA REUTERS

perilaku berbeda dari tritium di laut dan lebih mudah dimasukkan ke biota laut atau sedimen dasar laut," ahli kimia kelautan di Woods Hole Oceanographic Institution, Ken Buesseler, menjelaskan.

Pejabat pemerintah mengatakan air Fukushima akan dimurnikan kembali untuk memenuhi standar peraturan atas nuklida ini. Buesseler mencatat bahwa batasan tersebut diberlakukan untuk PLTN yang beroperasi, bukan untuk pembuangan air yang terkontaminasi secara sengaja dari bencana nuklir. "Apakah ini akan membuka pintu bagi negara mana pun untuk melepaskan limbah radioaktif ke laut yang bukan merupakan bagian dari tindakan normal perusahaan?" kritiknya.

Ahli geokimia kelautan di Universitas Tokyo, Shigeyoshi Otosaka, mengkhawatirkan akumulasi isotop di sedimen dasar laut, di mana isotop tersebut dapat diambil oleh biota laut. "Kemungkinannya kecil, tetapi penting untuk mengevaluasinya dengan tepat," katanya. Mengingat pernyataan TEPCO berasal dari uji coba pada volume air yang kecil. Dengan kata lain, perusahaan perlu memverifikasi apakah kinerja pemrosesan dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama.

Meskipun TEPCO mengklaim akan kehabisan ruang untuk menyimpan air tambahan pada pertengahan 2022, organisasi lingkungan mengatakan ada ruang untuk tangki tambahan di darat yang berdekatan dengan kantor Fukushima. Penyimpanan itu akan memungkinkan isotop radioaktif membusuk secara alami sambil menambah waktu untuk mengembangkan teknik pemulihan baru soal air limbah olahan.

Pelepasan zat radioaktif sisa dari PLTN Fukushima kira-kira sekitar sepersepuluh dari perkiraan radiasi yang dilepaskan oleh bencana nuklir Chernobyl tahun 1986. Radiasi Fukushima berdampak minimal pada manusia, meskipun evakuasi pencegahan memang menyebabkan masalah sosial dan kesehatan yang baru.

Sebagian besar bahan radioaktif jatuh ke Samudra Pasifik karena angin kencang. Kekhawatiran atas ikan yang terkontaminasi menghancurkan industri perikanan regional. Kini, permintaan makanan laut dari wilayah tersebut berangsur-angsur pulih, tetapi pejabat perikanan khawatir pelepasan air yang terkontaminasi akan menghidupkan kembali ketakutan publik tentang makanan laut dari wilayah tersebut.

FLORA LIBRA YANTI

GATRA
MAJALAH BERITA MINGGUAN

SIUPP: No. 297/SK/Menpen/SIUPP/C.1/1994, tanggal 13 Oktober 1994. **ISSN:** 0853-1706

Pendiri:
M. Hasan
Penerbit:
PT Era Media Informasi
Komisaris:
Tommy S. Kusuma
Pemimpin Umum:
Hendri Firzani
Direktur Utama:
Hendri Firzani
Direktur:
Budi Irawan
Penasihat:
Edy Sumarso

MAJALAH GATRA
Pemimpin Redaksi:
Mukhlison S. Widodo
Redaktur Pelaksana:
Bambang Sulistyo, Sujud Dwi Pratisto (Plh)
Sidang Redaksi:
Aditya Kirana, Andhika Dinata, Birny Birdieni, Flora Libra Yanti, Gandhi Achmad, Hendry Roris P. Sianturi, Hidayat Adhiningrat P., Putri Kartika Utami, Sandika Prihatnala
Sekretariat Redaksi & Marketing:
Jumadi, Pamungkas Sapto Handoyo, Puspita Sari
Produksi:
Desain:
Amin S. Putra (Kepala), Fritz Pelenkahu, Rico Wahyu
Foto:
Ardi Widi Yansyah, Adi Wijaya, Eva Agriana Ali
Bahasa:
Agus Teguh (Kepala), Rhea Febriani Tritami

GATRA TV
Pemimpin Redaksi:
G.A. Guritno
Produser Special Program:
Cicilia Karina, Riana Astuti
Produksi:
Fandi, Karim, Sammy

GATRA.COM
Pemimpin Redaksi:
Mukhlison S. Widodo
Redaktur Pelaksana:
Nur Hidayat, Rohmat Haryadi
Sidang Redaksi:
Anthony Djafar, Bernadetta Febriana, Rosyid
Liputan:
Iwan Sutiawan (Koordinator)
Erlina Fury, M. Almer, M. Guruh Nuary, Ryan Puspa, Ucha Julistian, Wahyu Wachid
Biro Daerah:
Abdul Aziz (Pekanbaru), Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
Foto:
Jongki Handianto (Kepala)

GATRA PEDIA
Pemimpin Redaksi:
G.A. Guritno
Kepala Bagian:
Yustinus Sarjana
Produksi:
Endang Sukendar (Kepala)
Annisa Setya Hutami, Arif Sugiono, Fitri Kumalasari
Desain:
Anas Priyo (Kepala), Rio Nugroho
Foto:
Erry Sudiyanto
Digital/Ecommerce & Data:
Fatikhin
Medsos & Event:
Fazri, Feby, Rikha

TIM PEMASARAN:
Kepala:
Vinca S. Soemantri (Wilayah I)
Gembong Wiroyudo (Wilayah II)
Wakil Kepala:
Cicih, Fahrudin
Group Head:
Leo Iqbal (Wilayah I)
Maria I. Pakpahan (Wilayah II)
Staf Pemasaran:
Edria Fausta K., Wanda Oktavia, Dewan Nugraha
E-mail: iklan@gatra.com

Staf Sirkulasi:
Yudi Riyanto, Jupri B. Dair
E-mail: sirkulasi@gatra.com

Business Development Marketing:
Fajar Lukito

Layanan Pelanggan:
Puspita Sari
Telepon: (021) 79196935
Fax: (021) 79196936
E-mail: langganan@gatra.com

Pencetak: PT. Naga Ular Bersatu, Jakarta

Alamat Kantor: Gedung GATRA, Jl. Kalibata Timur IV No. 15, Jakarta 12740
Telepon: (021) 7973535 (hunting), Fax: 79196941, 79196942, E-mail: redaksi@gatra.com

PANDEMI

Siap-siap Adang Lonjakan Penularan

Tsunami Covid-19 terjadi di India dan gelombang ketiga Covid-19 juga terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Mutasi varian baru memicu sebaran virus yang lebih cepat. Di tengah kondisi perayaan hari Idul Fitri, Pemerintah melakukan antisipasi melonjaknya jumlah pasien di daerah.

GATRA/ ARDI WIDI YANSAH

Rapid Test Antigen yang dilakukan kepada pengendara mobil atau motor di posko penyekatan perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor sebagai upaya mencegah kasus Covid-19 usai libur Lebaran

Tiga hari menjelang hari raya Idulfitri, angka kasus baru positif Covid-19 di Indonesia naik menjadi 4.891 kasus dalam sehari. Sementara itu, data harian yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sudah ada 1.709.762 orang dinyatakan positif terkena corona.

Jumlah ini dikhawatirkan akan bertambah, mengingat potensi lonjakan kasus dari klaster pascamudik Lebaran. Meski pun memang, Pemerintah sudah melarang kegiatan ini sejak 7 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 demi mengendalikan penyebarannya, namun sepertinya banyak warga tak mengindahkan. Kementerian Kesehatan mencatat, peningkatan pergerakan lalu lintas di daerah sudah terjadi sejak awal April lalu

Keukeh-nya pemerintah melarang mudik didasarkan pada kekhawatiran tentang ancaman mutasi varian baru virus corona yang sudah masuk Indonesia. Menurut Juru bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Pemerintah telah mencatat beberapa varian mutasi baru virus Covid-19 sejak awal tahun 2021.

Di antaranya adalah B.117 yang berasal dari Inggris, B.1351 dari Afrika Selatan, dan varian mutasi ganda dari India yakni B.1617. "*Varian of concern* atau VoC (perlu diperhatikan —*Red.*) yang diwaspadai ada tiga jenis, yaitu B.117, B.1351, dan varian B.1617," katanya.

Varian B.117 memiliki tingkat penularan lebih tinggi, 36%-75% dibandingnya dengan jenis lainnya. Jenis virus ini juga yang paling banyak dilaporkan beberapa negara, yang dalam catatan World Health Organization (WHO) di Asia Tenggara mengalami peningkatan kasus hingga 49%.

Di Indonesia ada 13 kasus dengan varian ini, dua di antaranya dari pekerja imigran Indonesia (PMI) Arab Saudi asal Karawang. Lalu satu orang asal Balikpapan dan satu PMI asal Bogor yang baru pulang dari Afrika Selatan dan Ghana yang transit di Qatar. Sedangkan kasus lainnya tersebar di Karawang, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, hingga Kalimantan Selatan. Serta Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Timur.

Nah, berkaitan dengan mutasi varian baru di Indonesia, Nadia menyebut saat ini masih dilakukan pengujian di 768 laboratorium. Namun, per April 2021, untuk sebaran varian jenis B.1617 muncul satu kasus di Jakarta dan Kepulauan Riau. Sedangkan untuk varian B.1351 ada satu kasus di Bali. "Dengan surveilans kita mewaspadai penambahan kasus yang sudah masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ini penting menjadi perhatian, mengingat lonjakan ekstrem kasus baru positif virus corona juga terjadi di beberapa negara. Misalnya India, yang mengalami "tsunami Covid-19" di mana rekor kenaikannya mencapai 412.000 pasien dengan angka kematian lebih 3.980 orang per hari. Kondisi serupa juga terjadi di Malaysia.

Bahkan, Malaysia memberlakukan *lockdown* alias perintah pengendalian pergerakan nasional terhitung 12 Mei hingga 7 Juni mendatang. "Hanya kegiatan luar ruangan tertentu yang diizinkan di bawah aturan ini," ujar Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin, seperti dikutip dari *The Straits Times*.

Dalam hal ini, beberapa kegiatan sosial, perjalanan antardistrik dan antarnegara dilarang, termasuk kegiatan makan di restoran dan acara sosial lain tak diperbolehkan. Hanya kegiatan ekonomi, keadaan darurat, janji medis, dan vaksinasi yang diperkenankan.

Beberapa negara di Asia Tenggara memang tercatat dalam kondisi waspada terhadap lonjakan kasus Covid-19. Sebut saja Thailand, yang angka kasus positifnya mendekati 2.500 orang dalam sehari. Nah, hal yang sama juga dialami Vietnam, di

ANTARA FOTO/ HAFIDZ MUBARAK A

mana kasus infeksi virus corona dari India ditemukan. Padahal sebelumnya, baik Thailand maupun Vietnam termasuk negara dengan kasus angka positif Covid-19 yang landai.

***

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban, mengatakan bahwa saat ini Indonesia menempati posisi keempat terbesar positif Covid-19 dengan jumlah kasus lebih dari 1,7 juta orang. Masih lebih kecil dibandingkan dengan Amerika 33,4 juta, India 22,4 juta, dan Brasil 15,1 juta. "Jadi kalau dari *ranking* ini, alhamdulillah Indonesia masih relatif lebih aman, lebih rendah prevalensinya," ia memaparkan.

Namun, Prof. Zubairi tak memungkiri bahwa ancaman ke depan yang dikhawatirkan adalah tsunami Covid-19, seperti halnya yang dialami India, Malaysia, dan sebagainya. "Gelombang itu mendekat ke Indonesia? Bisa saja. Lihat Malaysia yang kasus Covid-19 meningkat signifikan dan *lockdown* pun dilakukan di beberapa kota," ia mengungkapkan.

Kenaikan angka di India, menurut Prof. Zubairi, terjadi karena ada euforia vaksin. Karena sudah lebih dari 100 juta orang di India yang divaksinasi, sehingga merasa tidak mau pakai masker. Padahal, jumlah penduduk India 1,3 miliar, jadi masih sekitar 10% yang divaksinasi. "Di kita juga ada [euforia vaksin]. Namun kita harapkan tidak seburuk India," katanya.

Prof. Zubairi juga mengingatkan, masih ada risiko klaster perkantoran, buka bersama, serta KRL Jakarta-Bogor dan Jakarta-Bekasi yang masih padat pada jam tertentu. Kemudian masih ada yang melakukan Yasinan kalau ada yang meninggal, baik itu meninggal karena Covid-19 atau bukan. Menurut dia, seharusnya tidak ada kumpulan banyak orang di satu ruangan dengan waktu cukup lama.

Masalah lain, dia melanjutkan, mengenai asisten rumah tangga yang pulang kampung dan kembali lagi ke Jakarta. "Apakah bisa membuat klaster baru? itu juga harus disikapi. Sebaiknya kan asisten rumah tangga ini dapat divaksinasi. Namun, kadang-kadang surat keterangan domisili dari RT/RW dan Lurah itu juga tidak mudah didapatkan oleh asisten rumah tangga," ia memaparkan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan bahwa pemerintah melakukan pengetatan untuk pergerakan orang, baik itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, maka Pangdam dan Kapolda di daerah diminta mengintegrasikan seluruh instansi pusat terlibat dalam kepulangan TKI, terutama di pintu masuk kedatangan Indonesia.

"Gelombang itu mendekat ke Indonesia? Bisa saja. Lihat Malaysia yang kasus Covid-19 meningkat signifikan dan lockdown pun dilakukan di beberapa kota."

Zubairi Djoerban

ANTARA FOTO/ MUHAMMAD ZULFIKAR

Wiku juga menyebut bahwa dalam surat edaran Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga pemerintah melarang WNA yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari terakhir atau bagi mereka yang berdomisili di India. Hal lain, Pemerintah juga memantau pelarangan mudik selama 7-17 Mei 2021, termasuk mudik di wilayah aglomerasi atau lintas daerah, maupun dalam satu daerah.

Pengecualian pergerakan wilayah aglomerasi adalah pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian, seperti sektor logistik, makanan minuman serta energi, dan teknologi informasi. Beberapa sektor sosial ekonomi pendukung, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sektor seni sosial budaya boleh beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

"Kebijakan tetap adalah peniadaan mudik agar tidak terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pemicu kerumunan. Silaturahmi dengan kontak fisik berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga," Wiku memaparkan.

***

Sebagai antisipasi tren lonjakan kasus Covid-19 pasca-Idulfitri, Kementerian Kesehatan telah mendata seluruh kapasitas tempat tidur di seluruh faskes di Tanah Air. Juga pendataan farmasi dan alat kesehatan, termasuk melakukan pendampingan ketat pada daerah yang terindikasi

HUMAS BNPB/ DANUNG ARIFIN

Wiku Bakti Bawono Adisasmito

terjadi tren kenaikan kasus.

"Tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk. Saya merasa dan berharap insya Allah ini tidak terjadi. Tetapi kalaupun terjadi peningkatan penularan, kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget," Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan.

Budi Gunadi menyebut, antisipasi kesediaan tempat tidur RS, kesiapan obat-obatan, dan fasilitas lainnya, yakni oksigen, sudah diantisipasi sejak Januari lalu. Secara keseluruhan, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 390.000 unit, dan 70.000 ribu di antaranya digunakan untuk pelayanan Covid-19. Saat ini, tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 mencapai 23.000-an.

Sementara itu, ruang ICU secara nasional sebanyak sekitar 22.000 unit dan yang diperuntukkan untuk Covid-19 sebanyak 7.500 unit. Dengan tingkat keterisian ICU sekitar 2.500. "Kapasitas RS dan ICU yang kita miliki, itu masih tiga kali lebih besar dibandingkan dengan yang kita dedikasikan untuk Covid-19," Budi Gunadi menjelaskan.

Dari kalkulasi tersebut, ia memperkirakan masih ada ketersediaan tempat tidur hingga dua kali lipat untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus positif Corona. Juga apabila terdapat kekurangan permintaan tempat tidur maupun ICU, pihaknya siap melakukan relaksasi dengan mengonversi RS menjadi RS khusus Covid-19.

Kementerian Kesehatan juga melakukan pemantauan terhadap kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19 di seluruh daerah. Terutama daerah yang mengalami kenaikan kasus signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ada delapan daerah terindikasi mengalami peningkatan keterisian ruang perawatan dan ruang ICU khusus Covid-19: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.

"Beberapa provinsi jauh lebih tinggi kasusnya, ini yang harus menjadi perhatian kami pemerintah pusat dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepada gubernur, bupati, dan wali kota, tolong ini dijaga," ia menegaskan.

Di samping aktif melakukan pendataan kapasitas RS, Kemenkes saat ini juga berupaya keras untuk menjaga ketersediaan obat-obatan serta oksigen di seluruh Tanah Air agar tidak terjadi kekosongan. Kalaupun ada kekurangan, Budi mengimbau kepada daerah untuk dapat menyampaikannya ke Kemenkes agar bisa segera diupayakan untuk dipenuhi.

Birny Birdieni, M. Almer Sidqi, Ryan Puspa Bangsa, dan Erlina Fury Santika

CRYPTOCURRENCY

Ramai-ramai Main Kripto

Aset kripto lagi populer di kalangan trader dan investor. Peminatnya kelompok yang sudah melek investasi. Cocok bagi mereka yang siap ambil risiko tinggi, dan siap rugi.

Akhir-akhir ini, Andriansyah jarang membuka aplikasi perdagangan saham di ponsel pintarnya. Bagi-nya, pasar modal Indonesia sedang tak menggairahkan. Harga-harga saham terus turun, bahkan ada yang kembali ke harga lima tahun lalu. "Padahal, ini saham *bluechip* yang selalu digadang-gadang tahan banting. Eh, turun juga," kata laki-laki berusia 29 tahun tersebut.

Sambil menunggu bursa saham bergairah kembali, Andri mengalihkan investasinya ke aset kripto. Ia tertarik bermain di aset digital ini lantaran di

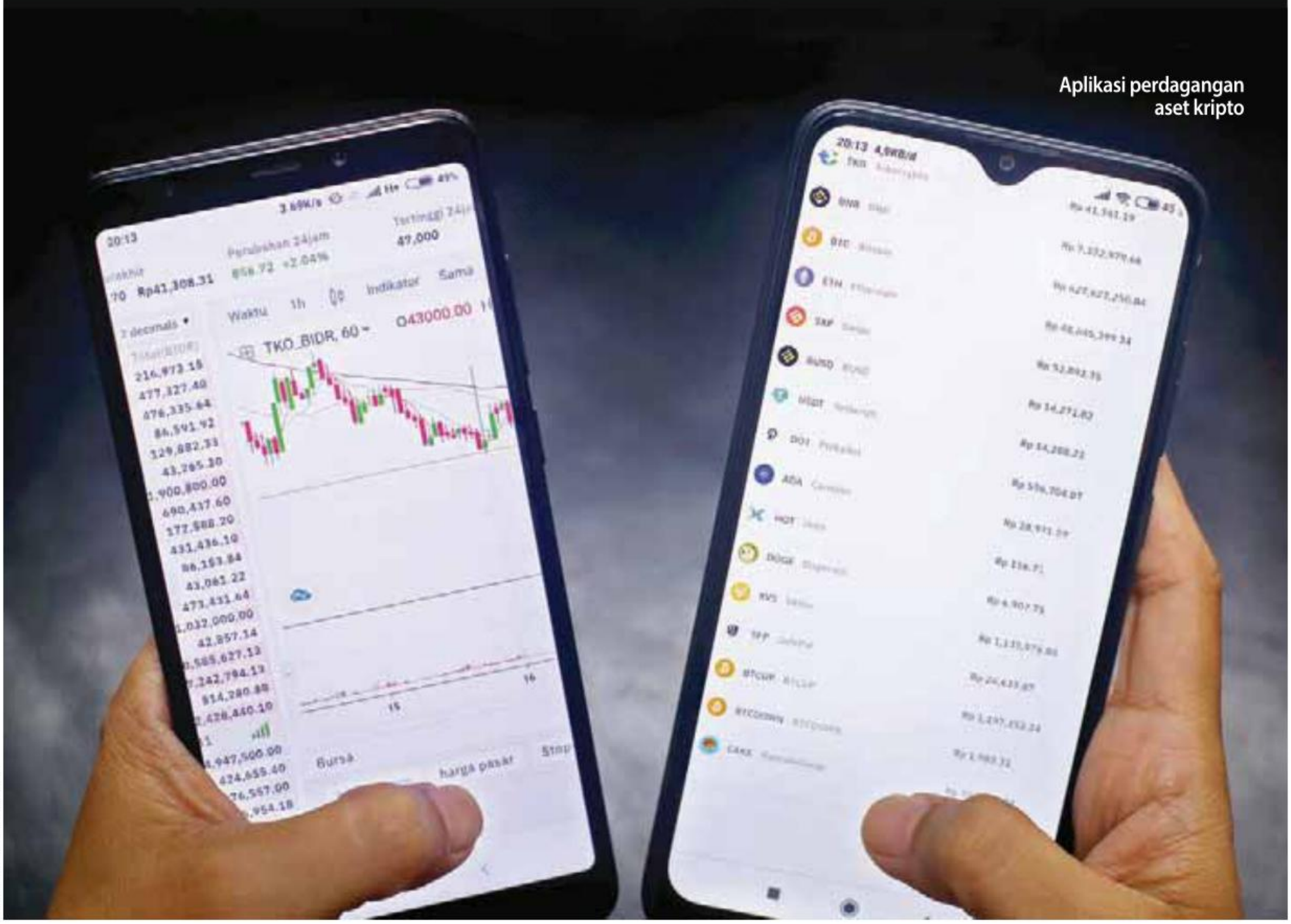

Aplikasi perdagangan aset kripto

GATRA/ ARDI WIDI YANSAH

komunitas saham yang diikutinya pun tengah asyik membahas peluang *cuan* di aset kripto. Tren pasarnya sedang bergerak naik atau *bullish*. Kelebihan kripto lainnya dibandingkan dengan saham, pasarnya buka dua puluh empat jam sepekan, alias tidak ada hari liburnya. Cara membuka akun pun sangat mudah dan tidak ada batas minimal modal awal.

Andri, yang sehari-hari berprofesi sebagai bankir, mulai berinvestasi kripto pada Desember 2020. Sebulan berselang, ia coba-coba untuk *trading*. "Jujur, saya tidak memiliki pengetahuan apa pun di dunia *trading* kripto. Saya bahkan enggak tahu caranya melakukan analisis fundamental dan teknikal. Parah kan?" ungkapnya lantas tertawa.

Trader harus punya mental siap rugi. Ia ingat pengalaman *cutloss* (jual rugi) yang lakukan akhir Januari lalu, saat harga Bitcoin merosot. "Tanggal 28 Januari Bitcoin turun ke US$30.000. Koreksi harga ini berpengaruh ke koin lain yang ikutan turun. Terpaksa *cutloss* 10 kripto. Total kerugian Rp5 juta semalam. Kapok? Enggak dong, soalnya pernah *cuan* lebih gede daripada itu," ujarnya.

Wid Mulyadi, 32 tahun, lebih dulu menggeluti perdagangan kripto ketimbang Andri. Wid menggeluti aset kripto sejak 2018. Ketertarikannya kepada kripto lantaran bisa *cuan* kilat dalam waktu singkat. Akhir Desember lalu, ia *profit taking* sekitar 70% dari modal awalnya dari dua jenis koin. Nilainya puluhan juta, meski ia tak merinci angka persisnya.

Duit dari bermain kripto bisa sangat menguntungkan, bahkan lebih besar daripada instrumen investasi lainnya. Namun, ini berbanding lurus juga dengan risikonya yang juga besar. "Ingat prinsip investasi, *high risk*, *high return*," ungkapnya. Bicara risiko, ia mengaku seorang *risk taker*. Sebelum aset kripto, ia juga main *forex* (*foreign exchange*) yang juga berisiko tinggi.

Sebagai orang yang sudah tiga tahun lebih menggeluti aset digital ini, ia menilai penggerak harga kripto murni berkaitan dengan hukum penawaran dan permintaan. Teori dan teknik apa pun yang dipakai, hasilnya tetap spekulasi. Ia membagikan wejangan dari pengalamannya tentang *trading* kripto kepada para pemula. Pertama, belinya mencicil, jangan pakai seluruh modal saat itu juga.Kedua, hindari beli koin yang harganya terlalu murah, karena untuk jual-belinya nanti lumayan susah dan lama.

Tips terakhir, pastikan punya Bitcoin (BTC) di antara koleksi koin. "Bitcoin ini sultan di antara semua kripto. Kalau dia turun, semuanya ikut turun. Kalau BTC naik, yang lain belum tentu naik. Sultan *mah* bebas!" ujarnya.

Apes justru dirasakan Hilam Firdaus. Pada 2017, saat aset kripto tengah *booming*, warga Garut, Jawa Barat, berusia 33 tahun ini ikutan menjajal investasi koin. Namun karena kosongnya regulasi yang mengatur

BAPPEBTI mencatat jumlah investor kripto hampir mencapai 4,5 juta orang pada Maret 2021. Angka ini melampaui jumlah investor saham, yang menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlahnya mencapai 2 juta investor.

Ia percaya diri lantaran setelah mencari informasi seputar *trading*, ternyata *trader* profesional yang hebat sekalipun sulit menebak tepat pergerakan harga kripto. Akurat 70% saja sudah bagus. Fakta bahwa *trader* profesional saja bisa kecolongan membuat Andri optimistis melakukan *trading* kripto dengan metodenya sendiri.

"Saya mengandalkan pengalaman dan *feeling*. Harus tenang, karena musuh *trading* adalah emosi seperti FOMO (*fear of missing out* alias takut ketinggalan tren), *greedy*, tidak sabaran, enggak siap rugi. *Trading* kripto ini berisiko tinggi. *So, do your own risk*!" ungkapnya.

investasi aset kripto saat itu, ia menarik semua uangnya. "Dulu khawatir soal legalisasinya. Apalagi pemerintah bilang *cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah, langsung deh *narik* dana," katanya.

Ketika uang digital ini kembali naik daun pada akhir 2020 silam, ia mulai tergoda juga kembali mengoleksi koin-koin tersebut. Memang, ia ragu saat bullish begin, ia tetap memaksakan untuk membeli, meski harganya sudah mahal. Tetapi karena takut "ketinggalan kereta", akhirnya ia mantap kembali main kripto Maret lalu. "Ternyata April ini *market* turun terus. Kayaknya memang pas beli juga kemahalan," karyawan perusahaan

rintisan tersebut mengungkapkan.

Di aplikasi *trading* kriptonya, kerugian potensialnya sudah mencapai 43%. Tetapi tak masalah, ia memilih opsi *hold* atau menahan jual ketimbang *cutloss* koin-koin koleksinya. Toh, uang yang dia investasikan merupakan uang dingin, nilainya pun kecil. Ia juga menjalankan prinsip diversifikasi investasi. Selain aset kripto, ia punya reksadana dan saham. "Hitung-hitung *nabung*. Semoga setahun lagi harganya naik," ia berharap.

Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) mencatat ada peningkatan investasi aset kripto di Indonesia. Pertumbuhan ini sejalan dengan penyebaran aset kripto yang lebih cepat di negara berkembang, termasuk Indonesia, dibandingkan dengan negara maju. Bitcoin menjadi *crypto asset* dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Harganya sekitar Rp800 juta.

Chairman A-B-I, Oham Dunggiol, mengatakan bahwa regulasi Indonesia turut mendukung investasi pada aset kripto karena telah diklasifikasikan sebagai komoditas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan hal ini sebagai investasi. Namun ia mengingatkan investasi ini punya risiko.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat jumlah investor kripto hampir mencapai 4,5 juta orang pada Maret 2021. Angka ini melampaui jumlah investor saham, yang menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlahnya mencapai 2 juta investor.

Tokocrypto, platform perdagangan aset kripto, turut merasakan tren tersebut lewat peningkatan jumlah nasabah baru. "Di kuartal I 2021 ada kenaikan sekitar 70%, di mana jumlah register *member* kita 425.000 investor. *Mobile apps* yang kita luncurkan pada Oktober 2020 juga sudah diunggah oleh lebih dari 400.000 orang," kata Head of Marketing Tokocrypto, Adytia Raflein, kepada GATRA.

> "*Hype* ini semakin menjadi-jadi ketika semakin banyak perusahaan internasional seperti Paypall dan yang lumayan heboh itu, Tesla, mengadopsi Bitcoin dalam perusahaan mereka. Orang semakin percaya kripto."
>
> Adytia Raflein

TOKOCRYPTO

Raflein menyebut tren kenaikan sudah terasa di awal pandemi dan masih berlanjut hingga kini. Puncaknya pada akhir Desember, ketika *market* kripto tengah bergerak naik, banyak orang beralih dari instrumen investasi konvensional ke aset kripto. "*Hype* ini semakin menjadi-jadi ketika semakin banyak perusahaan internasional seperti Paypall dan yang lumayan heboh itu, Tesla, mengadopsi Bitcoin dalam perusahaan mereka. Orang jadi semakin percaya kripto," ia menjelaskan.

Ada keunikan dari sisi profil *member* Tokocrypto di kuartal-4 2020 saat kripto sedang naik pamor. Jumlah *member* dengan rentang usia dewasa, 35-42 tahun membesar. Kelompok ini merupakan orang sudah mapan secara finansial serta melek investasi, mulai melirik kripto. Memang, rentang usia 21-35 masih mendominasi.

Tokocrypto memperdagangkan lebih dari 45 koin dan menambah tiga-empat koin baru setiap pekan. Top 5 yang menjadi primadona adalah Bitcoin, Doge, TKO (token yang diterbitkan Tokocrypto), Tehter, dan Etherium.

Menurut Raflein, harga aset kripto betul-betul bergantung pada mekanisme pasar, yakni permintaan dan penawaran. Meski nilainya sangat *volatile* alias naik-turun dan, harganya sulit diprediksi, investor harus memperhatikan sisi fundamental si koin. "*Market cap-nya* (kapitalisasi pasar) bagaimana. Lalu kegunaan koin itu apa, misalnya sebagai *exchange coin* atau ada *utility* lainnya," ujarnya.

PUTRI KARTIKA UTAMI

RESPECT THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

"States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public".

(Article 9, UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Digital Publishing

IBADAH HAJI

Hasrat Haji di Kala Pandemi

Pemerintah Saudi membuka ibadah haji tahun ini. Pemerintah Indonesia segera membangun lobi dan menyiapkan langkah mitigasi untuk keberangkatan jemaah. Belum ada kepastian kuota haji untuk jemaah Indonesia.

Dalam suasana perayaan Idulfitri 2021 ini, umat Islam dunia menerima kabar gembira. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan membuka ibadah haji tahun ini. Meski demikian, Pemerintah Saudi belum menjelaskan secara detail operasional penyelenggaraan haji pada tahun kedua pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah Saudi memang sudah menetapkan delapan aturan ibadah haji, namun kementerian haji dan umrah setempat belum menyampaikan secara resmi negara mana yang mengantongi izin pemberangkatan

DOK.GATRA/DHARMA WIJAYANTO

Jamaah Haji Indonesia sebelum pandemi Covid-19

jemaah untuk ibadah haji. Selain itu, kuota bagi jemaah haji di luar Saudi —termasuk Indonesia—juga belum diumumkan.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi H. Dasir, mengatakan bahwa Kemenag menyambut baik keputusan Pemerintah Saudi itu. "Kita tentu bersyukur dengan pengumuman dari Saudi bahwa tahun ini ada penyelenggaraan haji. Namun, Saudi baru memastikan adanya penyelenggaraan haji, belum mengumumkan rencana operasionalnya," kata Khoirizi dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin, 10 Mei lalu.

Ia menyebut rencana operasional tentang detail teknis penyelenggaraan akan diumumkan Pemerintah Saudi pada kesempatan berikutnya. Kemenag, Khoirizi melanjutkan, akan segera mengoordinasikan persoalan tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan skema penyelenggaraan dan kuota jemaah haji asal Indonesia.

Menurutnya, penjelasan Pemerintah Saudi terkait rencana operasional haji sangat menentukan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang pelaksanaann ibadah haji. Lantaran masih pandemi, penyelenggaraan ibadah haji akan digelar dengan "kondisi khusus" untuk melindungi jemaah dari wabah Covid-19.

Khoirizi mengungkapkan, sembari menunggu pengumuman resmi dari Pemerintah Saudi, Kemenag akan berkoordinasi dengan Duta Besar (Dubes) Saudi di Jakarta, Dubes Indonesia di Saudi, serta Konsulat Jenderal RI di Jeddah untuk menindaklanjuti informasi haji tersebut.

"Apa pun keputusan Arab Saudi, Kemenag akan siap menerima dan menindaklanjuti. Apalagi, Kementerian Agama bersama Komisi VIII

KEMENAG.GO.ID

"Saudi baru memastikan adanya penyelenggaraan haji, belum mengumumkan rencana operasionalnya."

Khoirizi H. Dasir

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) juga sudah melakukan sejumlah persiapan," ujarnya.

Untuk diketahui, Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada akhir Desember 2020 sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Skema itu disiapkan ke dalam beberapa skenario, mulai pembatasan kuota jamaah sebesar 50%, 30%, 25%, bahkan hingga 5%.

"Kami juga sudah melakukan serangkaian pembahasan dengan Komisi VIII DPR terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pembahasan sudah mendekati hasil akhir untuk mencapai kesepakatan bersama antara Kemenag dan DPR," ungkap pria yang juga Direktur Bina Haji Kemenag itu.

Yang tak kalah penting, jemaah haji Indonesia juga sudah mulai mengikuti program vaksinasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Jadi, jika nanti memang ada pemberangkatan, mereka sudah memenuhi syarat vaksinasi yang diharuskan Saudi karena masih dalam kondisi pandemi," pungkasnya.

***

Sebelum terbetik kabar tentang diperbolehkannya ibadah haji pada tahun ini, Kemenag sudah menggelar *bahtsul masa'il* dalam rangka persiapan pemberangkatan jemaah haji Indonesia. *Bahtsul masa'il* sendiri merupakan forum diskusi untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan fikih haji. Kegiatan itu berlangsung pada 27-29 April lalu di Bogor, Jawa Barat.

Acara dihadiri praktisi bimbingan ibadah haji, akademisi, dan perwakilan ormas Islam. Juga hadir sebagai narasumber perwakilan dari Kemenag, Pusat Kesehatan (Puskes) Haji Kemenkes, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lainnya. Dari forum itu, disusun langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah, jika ada pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada 2021.

Tentang hasil pertemuan itu, Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Khoirizi H. Dasir, mengungkapkan bahwa pandemi akan berdampak pada sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah haji. Penyesuaian itu ditinjau dan dibahas lewat *bahtsul ma'sail*, baik dari aspek kebijakan pemerintah Indonesia dan Saudi maupun dari aspek hukum fikih.

"Misal, jika Saudi menetapkan masa tinggal di Madinah hanya enam hari, tentunya tidak bisa ada *arbain* (salat di Masjid Nabawi). Ini akan kita bahas. Demikian juga kemungkinan kebijakan Saudi lainnya yang mengharuskan penyesuaian manasik haji

karena pandemi," ujarnya.

Karena itulah, Khoirizi mengungkapkan, semua pendapat dan pandangan fikih diketengahkan dalam forum tersebut. "Sebagai bagian dari mitigasi persiapan, kami gelar *bahtsul masa'il* untuk membahas sejumlah potensi permasalahan hukum ibadah atau fikih terkait manasik haji di masa pandemi," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M. Nur, sepakat agar pemerintah melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kesiapan itu mulai dari memprioritaskan vaksinasi terhadap calon jemaah haji, serta menyusun rencana mitigasi penyelenggaraan ibadah haji khusus bersama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Mestinya penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan dan diikuti calon jemaah haji Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan sederet aturan lainnya," ujar Firman kepada GATRA pada Senin, 10 Mei lalu. Firman berharap dengan gencarnya pelaksanaan vaksinasi di tanah air akan membantu penerimaan dunia, khususnya Saudi selaku tuan rumah pelaksanaan ibadah haji terhadap jemaah asal Indonesia.

Selain itu, menurut Firman, pemerintah perlu mempertanyakan besaran kuota keberangkatan jemaah haji Indonesia. Meski tidak terlalu optimistis tentang besaran kuota, ia berharap, setidaknya ada jemaah Indonesia yang bermunajat di Arafah sebagai puncak dari ibadah haji.

"Pemerintah memang telah mengantisipasi kemungkinan terburuk jika hanya mendapatkan kuota 5%, tetap komitmen memberangkatkan [jemaah]. Namun itu berisiko, karena waktu terus berjalan, sementara persiapan berupa vaksinasi masih jauh dari harapan," tuturnya.

Firman menyebut, dalam skenario haji 2021, pemerintah seharusnya merampungkan pemenuhan kuota jemaah sebesar 5% pada 22 April lalu. Artinya, tenggat waktu sudah terlewati. Ia mewanti-wanti jangan sampai negara tidak mampu memberangkatkan jemaah haji lantaran kurangnya persiapan.

DOK. AMPHURI

Firman M. Nur

Ia menyarankan agar kuota haji turut diserahkan ke pihak swasta, yakni PIHK. Firman mengalkulasi PIHK memiliki kuota haji sebesar 8%, yakni 17.000 kuota dari kuota haji nasional merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Firman meyakini, pemerintah dapat menjalankan peran dengan melakukan pengawasan terhadap PIHK dalam operasionalnya. "Jadi, bukan untuk mengesampingkan kemampuan jemaah haji reguler. Namun keberadaan jemaah haji khusus yang dikelola PIHK lebih siap diberangkatkan," ujarnya.

Berkaitan dengan kuota haji, pemerintah juga perlu mempertanyakan secara detail kepada Pemerintah Saudi melalui Konsulat RI di Jeddah. "Mestinya pemerintah tidak sekadar menunggu [pengumuman], melainkan melakukan lobi yang lebih *intens* kepada Pemerintah Saudi supaya memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mengirimkan jemaah hajinya," ujar Firman.

Menurut Firman, upaya keras itu diperlukan, mengingat tahun lalu Indonesia gagal memberangkatkan jemaah haji. "Indonesia masih masuk daftar 20 negara yang terkena *travel ban* (larangan perjalanan) oleh Saudi. Lantas, jangan sampai nasibnya seperti tahun lalu, Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji. Ini yang harus disiapkan," ia menambahkan.

***

Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin Abdul Fatah, mengatakan, MUI belum menerima permintaan fatwa dari Kemenag terkait ibadah haji. Sebelumnya muncul dorongan kepada pemerintah agar MUI menerbitkan fatwa terbaru terkait pedoman ibadah haji 2021 yang akan berlangsung di waktu dekat.

Hasanuddin menyebut, bila nanti Kemenag mengajukan permintaan fatwa, maka MUI akan merujuk pada regulasi yang ditetapkan negara penyelenggara haji. "*Lil wasail hukmul maqashid* (hukum perantara tergantung pada tujuannya)," ujarnya kepada GATRA, Ahad pekan lalu.

Ia menuturkan, jika Pemerintah Saudi sudah resmi mengeluarkan regulasi terkait mekanisme, ketentuan, hingga kuota haji, kemungkinan besar Kemenag meminta MUI segera menerbitkan fatwa. "Kalau diminta, kami (MUI) siap," katanya.

Meski demikian, Hasanuddin berpendapat bahwa fatwa soal haji yang dikeluarkan dalam sidang pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 MUI pada 26 November 2020 dapat menjadi rujukan. Saat itu, MUI me-

mutuskan empat fatwa soal haji. Di antaranya penggunaan masker bagi yang ihram, fatwa pendaftaran haji saat usia dini, fatwa pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, dan fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu.

Tentang penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi, ada empat poin krusial di dalam fatwa tersebut. Pertama, mengenakan masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umrah hukumnya haram, karena termasuk pelanggaran terhadap larangan ihram (*mahdzurat al-ihram*). Sedangkan, mengenakan masker bagi laki-laki yang berihram haji atau umrah hukumnya boleh (mubah).

Ketentuan kedua, dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (*al-hajah al-syar'iyah*), mengenakan masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umrah hukumnya boleh (mubah). Ketiga, dalam hal seorang perempuan yang mengenakan masker pada kondisi pada poin kedua, terdapat perbedaan pendapat, yakni wajib membayar fidyah dan tidak wajib membayar fidyah.

Keempat, keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang dimaksud, antara lain, adanya penularan penyakit yang berbahaya, adanya cuaca ekstrem atau buruk, adanya ancaman kesehatan apabila tidak mengenakan masker atau memperburuk kondisi kesehatan.

Hasanuddin menyebut MUI hanya menunggu keputusan Pemerintah Indonesia yang juga bergantung pada kebijakan Pemerintah Saudi. Sejauh ini belum ada pengumuman detail operasional terkait teknis penyelenggaraan ibadah haji 2021. "*Wasilah* itu mengikuti *maqashid*-nya. *Maqashid*-nya di Arab Saudi, Indonesia *wasilah*-nya saja," pungkasnya.

ANDHIKA DINATA,
UCHA JULISTIAN MONE, DAN M. ALMER SIDQI

Sumber:Riset GATRA

RESESI

Menakar Optimisme Lo

Satu tahun pandemi, Indonesia belum lepas dari jurang resesi. Insentif untuk meningkatkan konsumsi belum berdampak. Pemerintah optimistis, pertumbuhan ekonomi tahun ini tembus 7%.

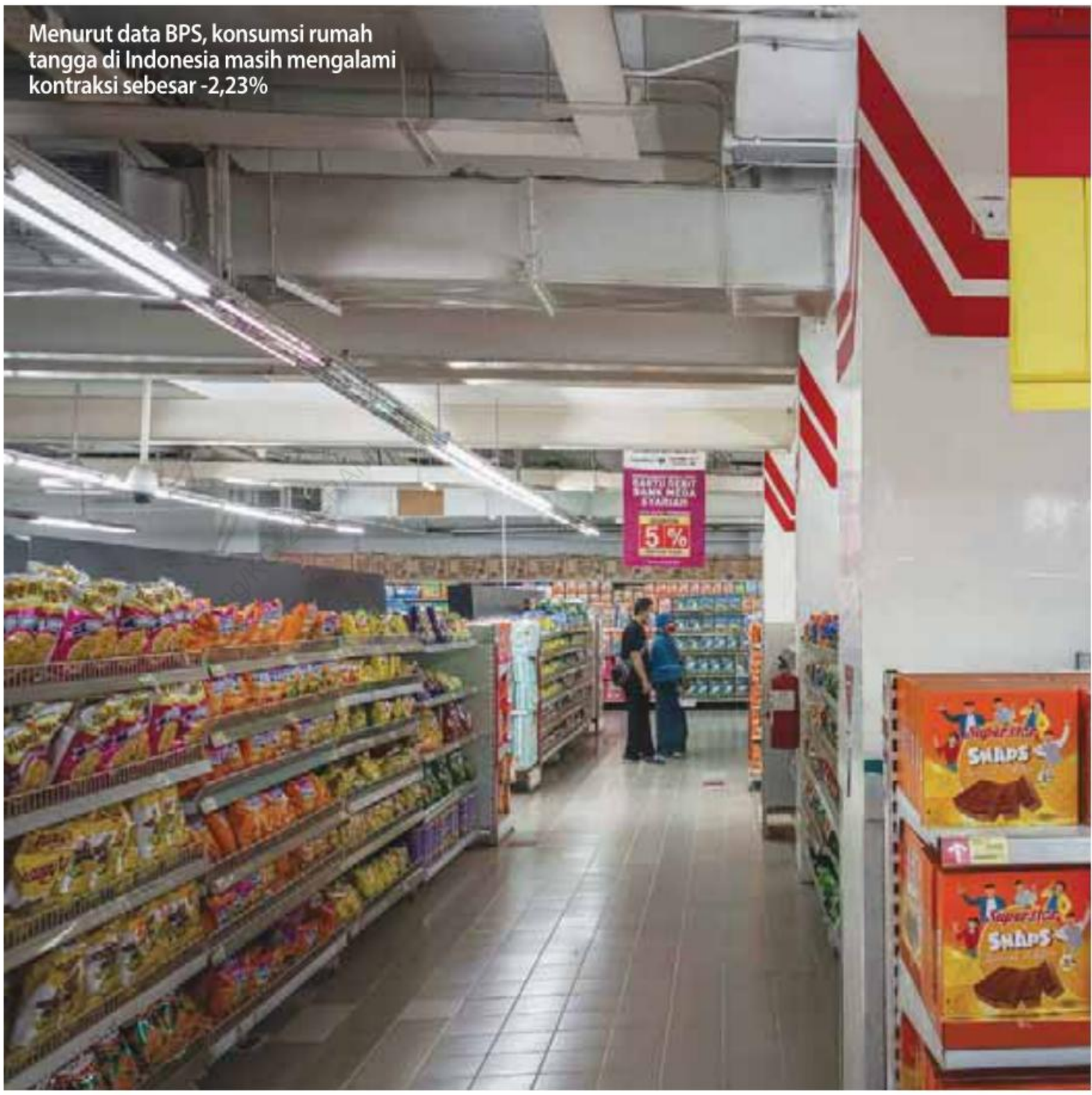

Menurut data BPS, konsumsi rumah tangga di Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar -2,23%

Empat kuartal berturut-turut dilalui Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif atau minus. Ini artinya, Indonesia masih berkubang di jurang resesi. Pada awal pandemi Covid-19, Maret tahun lalu, kinerja ekonomi kuartal I 2020 masih positif 2,97% dan barulah terjun bebas di kuartal II 2020 dengan -5,32%. Di kuartal III 2020, kinerja ekonomi mulai merangkak naik menjadi -3,49 %. Begitu pula di kuartal III minusnya semakin tipis, menjadi -2,19%.

Namun setahun melalui badai pandemi, Indonesia masih belum terbebas dari zona resesi. Pada kuartal I 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi dengan pertumbuhan -0,74% secara tahunan (yoy). Di mana dari sisi pengeluarannya, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam yakni -4,53% (lihat infografis).

Kepala BPS, Suhariyanto, menyebut kinerja minus itu salah satunya karena masih banyaknya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertahan karena belum dibelanjakan. Hingga Maret ini, total dana APBD yang belum dibelanjakan mencapai Rp182 triliun. Meski begitu, BPS mencatat konsumsi pemerintah sebenarnya sudah menunjukkan kinerja positif sebesar 2,96% ditopang oleh realisasi belanja APBN yang mencapai Rp523,04 triliun.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi sebesar -2,23%. “Konsumsi pemerintah agak terhambat, karena realisasi APBD, seperti belanja barang,

los dari Resesi

ANTARA FOTO/ APRILLIO AKBAR

belanja jasa dan belanja pegawai, APBD mengalami kontraksi. Kalau itu diwujudkan, konsumsi pemerintah akan membantu pertumbuhan ekonomi [tidak minus]," ujar pria yang akrab disapa Kecuk itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pencapaian kinerja ekonomi Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan tren menuju positif. "Kalau kita lihat berdasarkan berbagai data, pemulihan ekonomi terlihat dan *confirm* (terkonfirmasi) pada tren menuju positif. Ini adalah kurvanya "V" seperti di negara lain," katanya menegaskan (lihat infografis).

Karena itulah, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 akan melesat hingga mencapai 7%. Jika terealisasi, ini artinya Indonesia bisa lolos dari resesi. Argumen Airlangga tadi merujuk pada produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) kuartal I 2021 yang mencapai Rp2.683,1 triliun. Angka ini mendekati pencapaian kuartal I 2020 lalu sebesar Rp2.703 triliun. Meski konsumsi rumah tangga masih -2,23%, realisasi ini lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja kuartal IV 2020 lalu yang terkontraksi -3,61%.

Selain itu, PDB ADHK kuartal II 2020 dinilai relatif rendah, namun masih bisa mencapai Rp2.589,8 triliun. "Jika bisa konstan seperti saat ini, maka akan melompat sekitar 5,62%. Pemerintah *confident* bahwa angka 6,9% atau 7% itu bisa tercapai di kuartal II 2021," Airlangga menerangkan.

Direktur Eksekutif Institue for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai pemerintah terlalu optimistis dalam menarget pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada kuartal II 2021. Diakui Tauhid, memang akan ada pemulihan ekonomi pada kuartal II, namun belum pada titik optimal.

"Indef memproyeksikan kuartal II 2021 positif, namun kita perkirakan kurang-lebih 5% dan tidak [sampai] 7%," ujar Tauhid.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan Indef, salah satunya adalah laju vaksinasi Covid-19 yang belum tercapai maksimal. Sampai saat ini, yang sudah menerima vaksin baru kisaran 20 juta orang, padahal targetnya 180 juta orang yang divaksin. Hal lainnya adalah larangan mudik yang mengakibatkan tidak adanya momentum pemulihan melalui ekonomi mudik. "Daya beli masyarakat masih rendah, ditambah inflasi, tidak bisa mendorong konsumsi normal," ujar Tauhid.

Kemudian realisasi konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2021 yang terkontraksi -2,23% dengan inflasi di bawah 1,5%. Bandingkan dengan kinerja pada Maret 2020 lalu, di mana realisasi konsumsi rumah tangga mencapai 2,6% dengan inflasi 3%, sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 adalah 2,95%.

Kebijakan pemerintah melalui insentif yang membebaskan pajak pen-

GATRA/ EVA AGRIANA ALI

Suhariyanto

jualan atas barang mewah (PPn BM) juga belum terlihat memberi dampak positif di kuartal I 2021 ini. "Beberapa insentif perlu dipertanyakan, terutama pembebasan PpnBM selama tiga bulan di awal tahun ini. Karena ternyata tidak mendorong konsumsi jauh lebih tinggi pada kelompok menengah atas," Tauhid memaparkan.

Sebagai informasi, pemerintah melakukan relaksasi stimulus untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mulai penurunan uang muka untuk kredit beragun rumah tinggal atau kredit pemilikan rumah (KPR). Lalu juga memberikan diskon sebesar nol persen untuk PPn BM kendaraan bermotor pada awal Maret lalu. Berikutnya menanggung pajak pertambahannNilai (PPN) hingga 100% untuk sektor properti dengan harga hingga Rp5 miliar.

Analisis serupa disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada kuartal I 2021 sangat berat. "Karena pendorong pemulihan ekonomi kuartal I 2021 ini justru dari sisi eksternal, yaitu perdagangan. Bukan dari pembentukan nilai tambah atas struktur perekonomian domestik," ia memaparkan.

Menurut Rizal, masih perlu ada relaksasi dan kemudahan kredit untuk konsumsi. Bahkan bantuan sosial (bansos) mesti didorong lagi dengan realisasi di atas 60%. Serta ketepatan sasaran penerima bansos dan bantuan sembako menjadi hal yang sangat krusial. Per 16 April 2021, stimulus fiskal bansos telah menghabiskan anggaran hingga Rp47,92 triliun.

Tidak hanya itu, Rizal menyebut untuk mencapai pertumbuhan positif perlu ada perbaikan kinerja ekspansi pertumbuhan kredit yang dapat menggerakkan sektor riil. "Untuk sampai di posisi itu perlu melalui berbagai kebijakan yang tentu merelaksasi perkreditan, baik konsumsi maupun produksi," ujarnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit kuartal I 2021 masih -4,13%. Jika ingin agar kinerja ekonominya mengkilap, maka Indonesia harus menggenjot realisasi kredit dengan pertumbuhan maksimal pada level 5% hingga 7%.

Rizal menekankan perlunya dilakukan perbaikan kinerja kredit perbankan melalui kredit produksi untuk menggerakkan sektor riil. Terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat terdampak dengan pandemi. Sejauh ini, pelaku UMKM yang mampu bertahan adalah UMKM yang bergerak di sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, serta informasi dan komunikasi.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada kuartal I 2021 dalam kondisi normal, di tengah kondisi pemulihan ekonomi yang dibayangi gelombang lanjutan kasus Covid-19. Secara keseluruhan, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,5% hingga 5,3%. Sebab, kontraksi pertumbuhan ekonomi terdalam terjadi pada kuartal II 2020 lalu.

"Titik balik perekonomian kita ada pada kuartal II yang terakselerasi positif dan signifikan," katanya. Ia optimistis pada kuartal II 2021 ini daya konsumsi masyarakat akan terus menguat. Pertama karena keyakinan masyarakat yang membaik dengan adanya vaksinasi Covid-19 dan juga peningkatan aktivitas ekonomi.

Prediksi tersebut masih lebih optimistis dibandingkan dengan laporan Morgan Stanley, yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini mencapai 4,5% yoy. Ramalan pertumbuhan itu direvisi dari perkiraan sebelumnya yang bisa menembus 6,2% yoy. Angka ini diprediksi tak lepas dari capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartalnya.

Morgan Stanley memprediksi, pertumbuhan ekonomi kuartal II

"Kalau kita lihat berdasarkan berbagai data, pemulihan ekonomi terlihat dan konfirm pada tren yang menuju positif. Ini adalah kurvanya "V" seperti di negara lain."

Airlangga Hartarto

ANTARA FOTO/ NOVA WAHYUDI

2021 Indonesia bisa melejit hingga ke 6,5%. Namun pada kuartal III 2021 akan menurun tipis menjadi 6,3% dan pada kuartal IV 2021 masih di kisaran 6,2% yoy. Tidak hanya itu, Morgan Stanley juga merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 yoy dari 5,5% diubah menjadi 5,4%.

Sementara itu, pendiri sekaligus ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 3% hingga 4%. Nah, untuk menembus 5%, menurut dia, perlu terobosan baru dari pemerintah agar konsumsi masyarakat menjadi meningkat kembali. Sebab, sebagian besar masyarakat menengah dan atas lebih memilih menyimpan uangnya untuk persiapan dana darurat jika sewaktu-waktu terpapar dengan Covid-19.

Tentang konsumsi kuartal I 2021 yang masih rendah, Hendri menyebut dikarenakan 82% kelas menengah dan atas yang berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga masih menahan laju konsumsi. "Buat mereka, kesehatan itu nomor satu, sehingga mereka belum bergerak," katanya dalam webinar "Menakar Efektivitas Stimulus dalam Mengungkit Perekonomian di Masa Pandemi".

Sedangkan bagi kelas bawah, Hendri melanjutkan, daya konsumsi mereka bergantung pada bansos pemerintah. Hal lainnya, konsumsi di tahun ini juga memang belum seperti normal sebelum pandemi, sebab masih banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). "Ada 2,9 juta pekerja kehilangan pekerja. Mereka banyak belum mendapat pekerjaan dan hanya mengandalkan bansos yang hanya untuk *survival*," ia memaparkan.

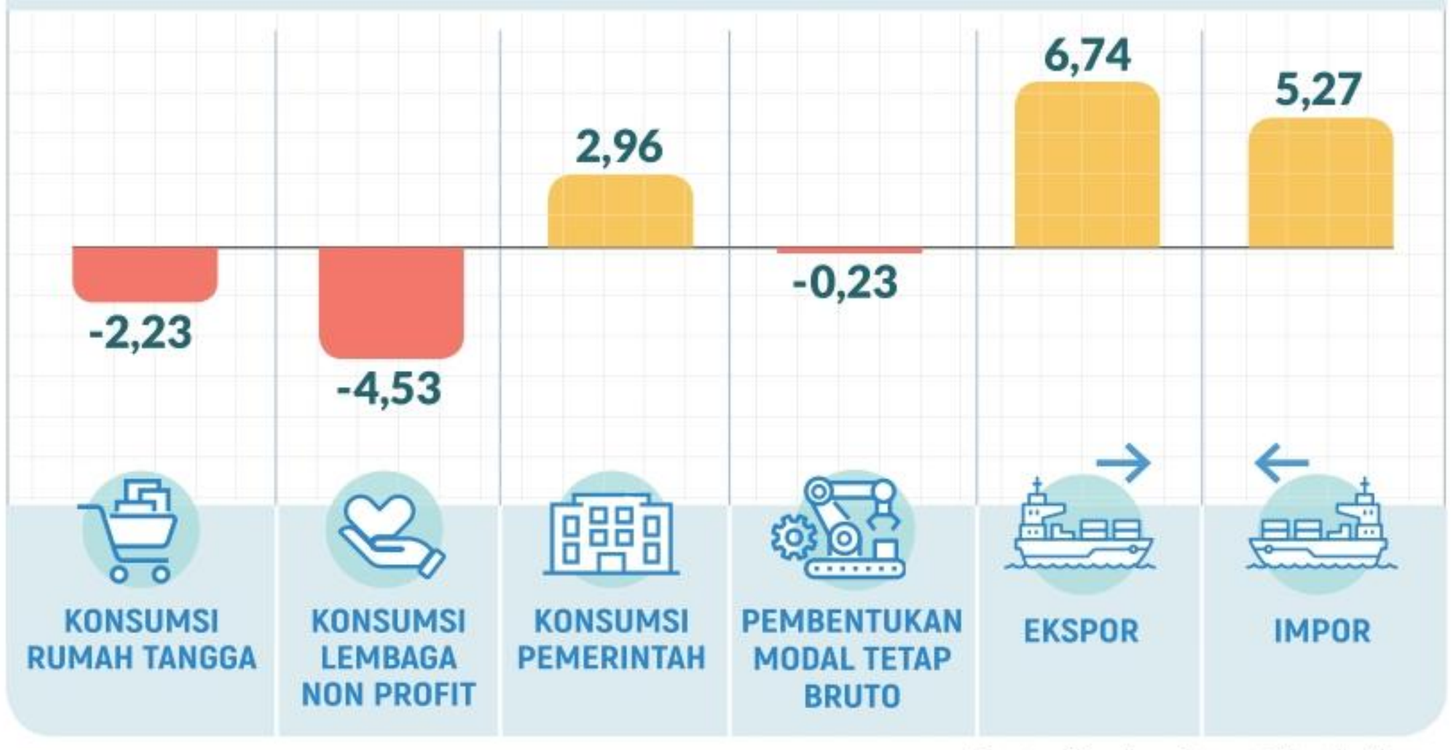

Data: Badan Pusat Statistik

Birny Birdieni, Ryan Puspa Bangsa, dan Wahyu Wachid Anshory

EFEK MUDIK

Kurang Bertenaga Karena Mudik Dilarang

Momentum libur hari raya Idulfitri tidak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Target pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 sekitar 7%, diproyeksikan sulit tercapai.

Ada nada menyayangkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memaparkan hasil pelarangan mudik Lebaran demi menekan angka penularan infeksi Covid-19 yang saat ini di dunia sedang memuncak. Menurut Jokowi, tercatat 1,1% penduduk Indonesia pulang ke kampung halaman selama masa larangan mudik, 6-17 Mei 2021.

"Memang 1,1 (persen) kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau dijumlah ternyata masih gede sekali, 1,4 sekian, 1,5 juta orang yang masih mudik," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa lalu.

Jokowi pun berharap fenomena mudik tak meningkatkan jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Karena itu, ia meminta semua pihak berhati-hati menghadapi risiko lonjakan kasus virus corona. "Pasca-Lebaran hati-hati, betul-betul kita harus waspada karena berpotensi, ada potensi jumlah kasus baru Covid," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah memang sudah membuat aturan sebagai dasar pelarangan mudik larangan yang berlaku dari 6-17 Mei kemarin. Yaitu dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13/2021

GATRA/ EVA AGRIANA ALI

tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah yang diterbitkan Maret lalu.

Belakangan demi menekan kasus Covid-19, pemerintah memperketat larangan mudik Lebaran 2021 dengan menerbitkan adendum SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13/2021, pada 21 April 2021. Mudik tidak hanya dilarang pada 6-17 Mei, melainkan dari 22 April hingga 24 Mei 2021. Kebijakan periode larangan mudik diatur kembali karena banyaknya masyarakat yang sudah mudik lebih awal.

Bagi pemerintah, memperketat larangan mudik sebenarnya pilihan sulit. Pasalnya, selama ini, tradisi mudik Lebaran dan ramadan merupakan momentum pengungkit ekonomi nasional. *Mudiknomics*, istilah yang digunakan untuk geliat ekonomi di momentum mudik, bahkan berkontribusi hingga 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) tahunan.

Sejak pandemi datang, momentum Ramadan dan Lebaran tidak lagi bertaji mengerek pertumbuhan ekonomi. Pada periode Ramadan dan Lebaran tahun lalu, contohnya, yang jatuh pada kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi justru *nyungsep* -5,32%. Selain adanya kebijakan larangan mudik, masih gagapnya pemerintah merespons pandemi ikut menahan laju ekonomi.

Tahun ini, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Kondisi ini bisa berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021. Meski demikian, pemerintah optimistis, target ekonomi kuartal II 2021, yaitu sebesar 7%, bisa tercapai.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, larangan mudik 2021 tidak terlalu berimbas terhadap laju ekonomi kuartal II, seperti yang terjadi di kuartal II tahun lalu. Karena pemerintah sudah mengeluarkan berbagai stimulus untuk mendukung konsumsi masyarakat.

Di antaranya, meminta pengusaha dan pelaku *e-commerce* menyubsidi ongkos kirim (ongkir) di Hari Belanja Online (Harbolnas) kemarin. Lalu ada stimulus di sektor otomotif yaitu relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) yang dikeluarkan Maret lalu. Kata Airlangga, kebijakan-kebijakan ini sukses mendorong ekonomi.

Perbandingan PDB kuartal II 2021 atas dasar harga konstan juga sudah mendekati Rp2.700 triliun. "Dengan basis kenaikan itu, pertumbuhan ekonomi sudah 4,7%. Tinggal didorong sedikit lagi untuk mencapai 7%," kata Ketua Umum Partai Golkar itu dalam konferensi pers virtual pada Sabtu pekan lalu.

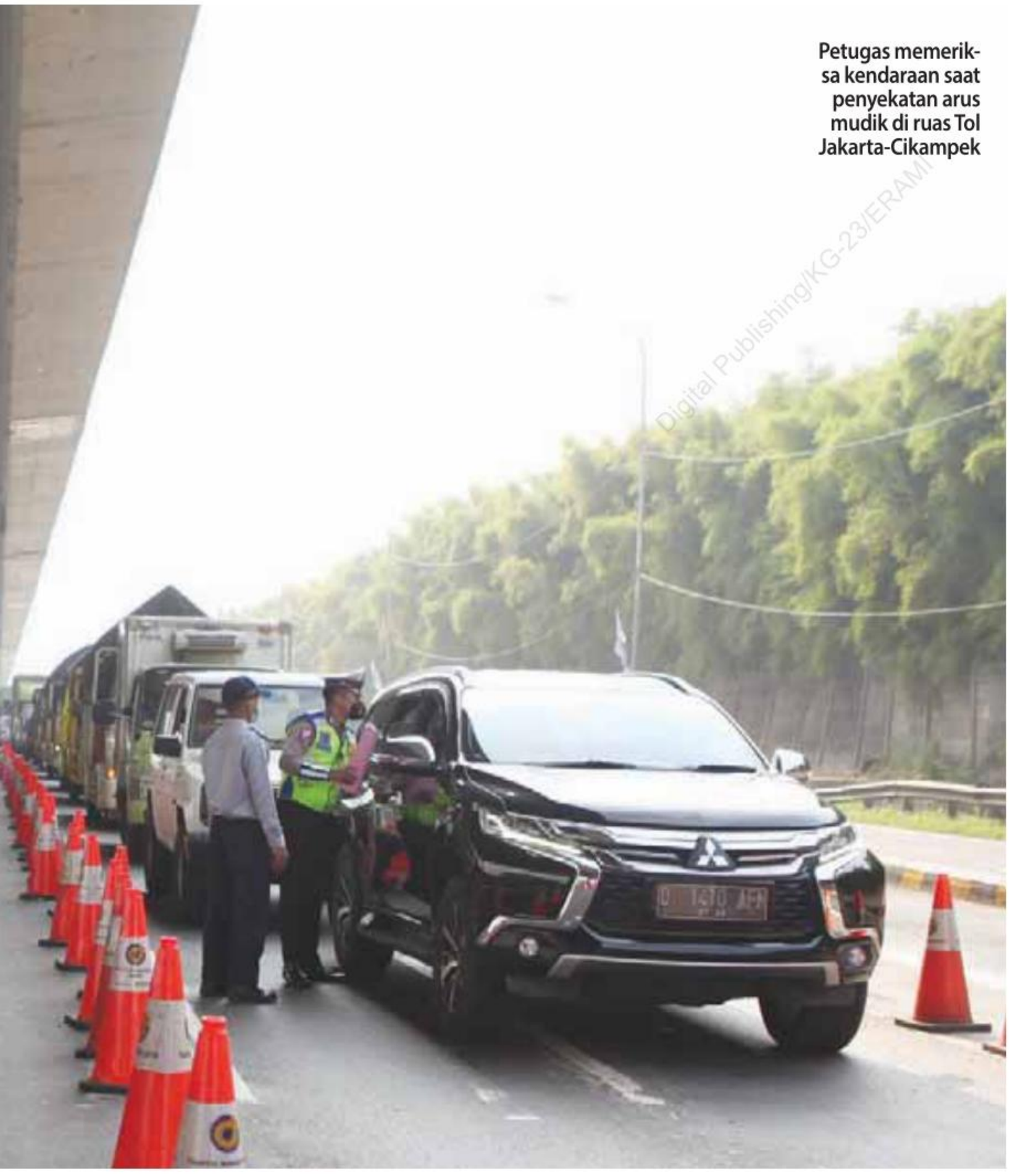

Petugas memeriksa kendaraan saat penyekatan arus mudik di ruas Tol Jakarta-Cikampek

Digital Publishing/KG-23/ERAM

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, meskipun ada larangan mudik, perputaran uang tunai selama libur Lebaran tahun ini naik 41% dibandingkan tahun lalu, karena adanya peningkatan aktivitas belanja.

Alasan lain yang membuat pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 mencapai 7% walau ada larangan mudik, yaitu dilihat dari beberapa indikator. Mulai antusias belanja masyarakat hingga indeks keyakinan konsumen *purchasing managers index* (PMI) manufaktur dan mobilitas masyarakat pada kuartal II.

Di samping indikator tadi, kata Susiwijono, pencairan bantuan sosial tunai (BST) lebih cepat ikut mendukung geliat ekonomi di momentum Lebaran. Sampai 11 Mei 2021, realisasi program BST mencapai Rp 11,81 triliun, atau 98,39% dari alokasi anggaran Rp 12 triliun pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Indeks Penjualan Riil (IPR) per Maret 2021, yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), mampu mencatatkan pertumbuhan 6,1% (mtm). Angka ini naik dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 2,7%. "[Indikator-indikator tadi] terkonfirmasi cukup tinggi," kata Susiwijono dalam acara media *briefing* pada Senin lalu.

HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN

Susiwijono

BPMI SETPRES/ LUKAS

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia secara virtual

Digital Publishing by KG Media

***

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, larangan mudik bisa membuat laju ekonomi nasional kurang bertenaga. "Kita sadar, dengan adanya larangan mudik kemarin, ada potensi ataupun peluang pertumbuhan yang lebih besar hilang," ujarnya kepada GATRA, Selasa lalu.

Menurutnya, momentum Lebaran dan mudik dapat meningkatkan uang yang beredar di masyarakat sekitar 10% lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa. Mengacu pada data Bank Indonesia, realisasi penarikan uang tunai di periode Idulfitri sepanjang 2015-2019 rata-rata mencapai Rp166,48 triliun. Sementara itu, di periode Idulfitri 2020, di mana pandemi sudah mewabah di Indonesia, realisasinya hanya Rp109,2 triliun.

Yusuf ragu bahwa target pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal II 2021 bisa tercapai, karena masih dikeluarkannya kebijakan larangan mudik. "Masih cukup berat untuk mencapainya," ujar alumnus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini.

Meski demikian, Yusuf meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 bisa keluar dari zona resesi alias positif. "Kami memproyeksikan di kuartal II, level pertumbuhannya di level 4% sampai 5%. Lebih rendah dari proyeksi pemerintah," katanya.

Selain larangan mudik, kata Yusuf, penyebab lain sulit tercapainya target 7% pertumbuhan ekonomi di kuartal II yaitu tingkat pengangguran

yang masih tinggi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26%, lebih besar daripada Februari 2020 yang hanya 4,94%. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menurun pada Februari 2021 sebesar 68,08% dari Februari 2020 sebesar 69,21%.

Sementara itu, secara teori, kata Yusuf, tingkat pengangguran berkaitan dengan daya beli. "Dengan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja, ini yang salah satu menahan laju dari daya beli, untuk kemudian mempa pertumbuhan ekonomi hingga 7% seperti yang ditargetkan pemerintah," katanya.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menjelaskan, pelarangan mudik berdampak pada tidak adanya redistribusi pendapatan ke daerah-daerah. "Enggak ada efek dari ekonomi Lebaran ke ekonomi. Kalau ada, kecil sekali," katanya kepada GATRA.

Enny mencatat, biasanya *mudiknomics* memiliki efek pengganda yang besar, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. "Katakanlah orang dari Jakarta ke Solo saja, dari yang dilewati itu saja sudah ada tetesan pengeluaran. Apakah akomodasi, restoran, wisata, hotel, termasuk jajanan," ujarnya.

Imbauan tidak mudik dan melakukan transfer uang ke kampung juga tidak efektif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena, kata Enny, perputaran uang yang besar terjadi jika ada mobilitas. "Yang diikuti dengan *spending*. Kalaupun ditransfer paling untuk kerabat. *Spending*-nya enggak sebesar kalau ada mobilitas orang," katanya.

> "Larangan mudik membuat potensi ataupun peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, hilang."
>
> Yusuf Rendy Manilet

Enny juga memperkirakan, target pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 sebesar 7%, sulit tercapai. Selain adanya larangan mudik, faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi yaitu daya beli yang masih lesu.

Mengacu pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021, menurut Enny, walaupun ekspor dan impor tumbuh positif masing-masing 6,74% dan 5,27%, tidak banyak berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Hal ini ditunjukkan dari masih tingginya tingkat pengangguran. Implikasinya pada pengeluaran yang rendah sehingga menekan konsumsi rumah tangga. "Ini sebenarnya yang cukup mengkhawatirkan terhadap pertumbuhan yang sustainable. Karena apa, karena kunci pertumbuhan yang sustainable itu terletak di daya beli," ujarnya.

Enny mengatakan, jika ingin pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 mencapai 7%, maka konsumsi rumah tangga di periode yang sama harus minimal 5%. Persoalannya, konsumsi rumah tangga di kuartal I 2021 masih -2,23%.

Menurutnya, untuk mencapai konsumsi rumah tangga di 5% dari minus 2,2% itu cukup berat. Ditambah lagi, efek *mudiknomics* tidak signifikan karena larangan mudik. "Ini Menko Ekonomi asumsinya, ada ekonomi lebaran. Mereka lupa kalau ekonomi lebaran ini di tengah pandemi," katanya.

HENDRY RORIS SIANTURI

> "Mudik dilarang, pengangguran masih tinggi dan daya beli masih lesu, sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal II 2021."
>
> Enny Sri Hartati

GATRA/ JONGKI HANDIANTO

MAFIA TANAH

Langgam Intrik Mafia

Lahan yang diduga menjadi sengketa di daerah Dadap, Kabupaten Tangerang (4/1/2021). Foto diambil sebelum

Perjalanan Wawan Tjandra untuk memperjuangkan hak atas tanah milik keluarganya tak kunjung usai. Semenjak "diduduki" sekelompok preman pada 2013 silam —atas perintah Wong Ivonne Emmy—tanah yang terletak di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 48, Taman Sari, Jakarta Barat, ini makin tidak keruan statusnya.

Meski begitu, Wawan atas nama para ahli waris, yakni dr. Tan King Poo (almarhum) yang diwariskan ke Theodorus Kemal Tjandra (almarhum) dan Luwiningsih Tjandra (almarhum)—selaku pemilik sah atas tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 454/Taman Sari itu—tak mau menyerah. "Saya akan terus berusaha memperjuangkan hak kami selaku pemilik yang sah," kata Wawan kepada GATRA, Ahad dua pekan lalu.

Wawan adalah cucu dari mendiang Tan King Poo, seorang dokter pejuang kemerdekaan. Di atas tanah yang luasnya sekitar 1.068 meter persegi itu,berdiri rumah warisan sang kakek. Kondisi rumah sudah tak terawat dan ditutup pagar seng. Di depan pagar terbentang plang bertulisan "Dilarang masuk, tanah milik Ny. Theresia Budina dalam penguasaan dan pengawasan Law Firm Henry Yosodiningrat and Partners".

Ketika GATRA menyambangi rumah itu, ada enam orang yang berjaga. Mengetahui kedatangan GATRA, mereka dengan sigap keluar melalui pintu seng. Sikap mereka tak terlalu ramah. "Kami di sini hanya menjaga, Bang. Kalau mau lebih lanjut untuk mengetahui perkara di sini, bisa ke Pak Henry (Henry Yosodiningrat)," ucap salah satu penjaga yang mengaku bernama Antoni.

Antoni dan rekannya tidak ingin berbicara lebih jauh mengenai perkara tanah dan rumah itu. "Kita di sini ya hanya menjalankan tugas saja bang. Atas suruhan dari Pak Henry dan Bu Theresia (Theresia Budina). Kalau soal perkara dan lainnya, ya silakan bertanya ke Pak Henry," Antoni mengungkapkan.

***

Perjuangan Wawan makin berat setelah terbit surat dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat pada tanggal 26 Januari 2021, perihal "Penempelan Naskah Pengumuman Pembatalan Sertifikat". Dalam surat tersebut disebutkan bahwa SHM Nomor 454/Taman Sari atas nama Thodorus

Tanah

Beragam modus mafia tanah kerap muncul di tengah masyarakat. Keterlibatan oknum BPN dan pengadilan menjadi kekuatan para mafia tanah. Mungkinkah diberantas tuntas?

GATRA/ADI WIJAYA

plang tersebut dicabut

Kamal Tjandra dan Luwiningsih Tjandra telah dibatalkan.

Padahal, Wawan bercerita, sejak 1950, sang kakek, Tan King Poo, dan ahli warisnya telah menempati rumah tersebut. Selaku seorang dokter pejuang kemerdekaan, sang kakek adalah penerimaTanda Jasa Pahlawan (Bintang Gerilya) Republik Indonesia dari Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1958. Juga penerima tanda jasa Trikora, Dwikora, serta Aksi militer 1 dan 2. Sebagai pejuang kemerdekaan inilah, Tan King Poo diberi kesempatan dapat membeli tanah dan rumah milik negara bekas Belanda.

Sejak itu, Tan King Poo dan ahli warisnya menjadi pemilik tanah yang sah. Hingga muncul gugatan perdata atas tanah itu pada 1983 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Pengugat adalah Kirman Muliawan. Namun gugatan ditolak karena ternyata pemberi kuasa Kirman Muliawan telah meninggal pada 1975, sebelum gugatan dilakukan.

Tidak berhenti di situ. Tetiba muncul lagi gugatan pada 1987 atas nama Dina Setiadi. PN Jakarta Barat mengabulkan gugatan, dan pihak Tan King Poo melakukan banding. Hasilnya, pada 1988, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Barat. Masih di 1988, Dina Setiadi memberikan kuasa kepada Theresia Budina untuk melakukan upaya kasasi. Namun, di tingkat kasasi, pada 1993, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi. Sejak itu, Theresia Budina tidak melanjutkan perlawanan hukumnya.

Berikutnya, pada 2007, Theresia Budina kembali mengajukan gugatan. Kali ini gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Singkat cerita gugatan sampai ke tingkat peninjauan kembali (PK) yang putusannya pada 2010, memenangkan pihak Tan King Poo. Di tengah gugatan tersebut, pada 2009, Theresia Budina melakukan gugatan perdata ke PN Jakarta Barat. Lagi-lagi, Theresia Budina kalah hingga tingkat kasasi pada 2012. Masih belum puas, Theresia kembali menggugat perdata di PN Jakarta Barat pada 2013, namun hasilnya ditolak.

Wawan menuturkan, usai kemenangan melawan Theresia Budina, keanehan kembali muncul. Yakni, ada perempuan bernama Wong Ivonne Emily yang mengaku sejak 1986 telah memiliki dan menguasai tanah milik keluarganya berdasarkan

salinan fotokopi surat tanah berupa Eigendom Verponding 18026 atas nama Tan Joe Nio. Padahal, keluarga Wawan yang menguasai fisik tanah tersebut sejak 1950 dan memperoleh SHM Nomor 454/Taman Sari atas nama Tan King Poo.

Wong Ivonne Emmy melakukan penyerangan dengan kekerasan ke rumah Wawan pada Agustus 2013 bersama sejumlah preman. "Di rumah ketika itu hanya ada dua asisten rumah tangga. Mereka diusir. Barang-barang dijarah, dan dirusak hingga dibakar. Untungnya sertifikat rumah tidak ada disitu," Wawan membeberkan.

Ketika itu, pihak Wawan langsung melaporkan serangan itu ke polisi dan kasusnya bergulir ke meja hijau. Atas perbuatannya, Wong Ivonne Emily cs divonis penjara. Setelah menjalani masa tahanan, Wong Ivonne Emily memasuki lokasi rumah keluarga Wawan dan kembali melakukan penyerobotan, padahal saat itu di area rumah masih terpasang garis polisi. "Sejak itu, ahli waris yang merupakan sebagai pemilik yang sah, sampai saat ini tidak dapat menguasai kembali persil tersebut," kata Wawan.

Wong Ivonne Emmy bisa melakukan penyerobotan setelah gugatan perdatanya di PN Jakarta Utara dikabulkan. Menurut kuasa hukum Wawan Tjandra, Handi Hidayat, perkara tersebut dibuat seolah olah adanya jual-beli hak tahun 1986 antara Wong Ivonne Emmy dan Dr. Sri Wiharti Arifin—satu-satunya ahli waris Tan Joe Nio. Hasilnya, PN Jakarta Utara memenangkan Wong Ivonne Emmy dalam putusan Nomor 501/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.

Dalam salinan putusan yang diperoleh GATRA, Wong Ivonne Emmy sejak 1986 melakukan pembayaran jual-beli kepada Dr. Sri Wiharti Arifin untuk pembelian lahan tersebut. Namun transaksi pembayaran dicicil selama 27 tahun, yakni mulai 1986 hingga 2014. Total uang pembayaran mencapai Rp2.04 miliar.

Handi mengungkapkan ada kejanggalan dari perkara gugatan ini, putusannya Verstek—putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat. "Bagaimana bisa objek di Jakarta Barat [tapi] sidang di Jakarta Utara, apalagi dalam perkara tersebut ahli waris Dr. Tan King Poo yang menempati rumah malah tidak dijadikan pihak tergugat," ia mengungkapkan.

Lebih parah lagi, sambung Handi, Eigendom Verponding Nomor 18026 atas nama Tan Joe Nio telah hapus karena hukum haknya dan dikuasai langsung oleh negara sejak 24 September 1961 sebagaimana tertuang dalam surat Kantor Administrasi Jakarta Barat tanggal 19 Oktober 2017. "Kami curiga ada permainan oknum BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pengadilan," ucapnya.

Kejanggalan lainnya, awalnya di atas lahan yang disengketakan itu, terpasang plang dengan tulisan "Tanah milik Wong Ivonne Emmy", tapi kini tulisan di plang tersebut telah berganti menjadi tanah milik Ny. Theresia Budina.

Sementara itu, tentang putusan *verstek*, Humas PN Jakarta Utara, Djuyamto, enggan berkomentar lebih jauh karena belum membaca putusan tersebut. "Saya pelajari dulu putusannya, karena saya cek di *website* perkara 2014 ini belum masuk, mungkin masih di arsip," ujarnya kepada GATRA.

Setelah menang perdata di PN Jakarta Utara, Wong Emmy juga menggugat BPN di PTUN Jakarta untuk meminta pembatalan SHM Nomor 454/Taman Sari yang dimiliki keluarga Wawan. Dan pengadilan mengabulkan gugatan tersebut. "Ada kejanggalan, kami tidak diikutsertakan

ANTARA FOTO/RENO ESNIR

Yusri Yunus

sebagai pihak dikarenakan surat panggilan kami tidak dialamatkan kepada kami, maupun kuasa hukum kami," kata Wawan.

Kemudian, Wawan melanjutkan, sertifikat tanah yang asli tidak pernah diuji secara materiil dalam perkara tersebut. Terlebih, pihak BPN Jakarta Barat tidak mengajukan kontra-memori banding, juga tidak mengajukan kontra-memori kasasi. "Sebenarnya pihak BPN sebagai lawan dapat meneliti putusan perdata dan mengabaikan putusan PTUN tersebut, karena sengketa mengenai kepemilikan adalah kompetensi pengadilan negeri dalam bidang perdata," ia membeberkan.

Karena itu, Wawan menambahkan, sangatlah tidak layak apabila BPN Jakarta Barat mengusulkan pelaksanaan pembatalan SHM milik keluarganya hanya berdasarkan putusan PTUN tersebut. "Kita sedang lapor perkara ini ke Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang), semoga bisa segera digelar perkara dan dibuktikan siapa yang benar," ucapnya.

Tentang polemik tersebut, GATRA mencoba mengonfirmasi kepada pihak Kantor Pertanahan Administratif Jakarta Barat. Namun, Kepala Pertanahan (Katan) Jakarta Barat, Sri Pranoto, belum berkenan untuk diwawancari dengan dalih masih padatnya agenda rapat di kantornya.

GATRA juga mencoba mengonfirmasi ke Law Firm Henry Yosodiningrat and Partners selaku kuasa hukum Theresia Budina, namun salah satu pengacara di Law Firm itu, Ragahdo Yosodiningrat, enggan merespons permohonan wawancara GATRA. "Selamat siang, Mas. Yang menangani kasus ini dan mendalami sekali adalah kakak saya Dr. H. Radhitya Yosodiningrat, SH, MH. Saat ini Mas Adhit (Radhitya) sedang dalam istirahat dokter (sakit). Setelah kondisinya membaik, kami segera akan menghubungi, Mas. Terima kasih atas perhatiannya," ungkap Ragahdo, adik dari Radhitya.

Berikutnya, GATRA berupaya menghubungi Radhitya namun tak ada jawaban, nomor telepon selulernya tidak aktif. Hingga berita ini ditulis, pihak Law Firm Henry Yosodiningrat and Partners belum memberikan keterangan resmi.

> "Jadi harusnya BPN tidak hanya menguji secara formil saja tapi juga meteriilnya. Jadi dicek, dokumen pengajuanya sudah benar atau tidak, bodong atau tidak."
>
> Deddy Setiady

***

Tak jauh berbeda dengan kasus lahan Wawan Tjandra. Polda Metro Jaya berhasil membekuk komplotan mafia tanah. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menjelaskan bahwa para mafia tanah terungkap saat berupaya mengakuisisi lahan seluas 45 hektare di kawasan Alam Sutera, Pinang, Kota Tangerang, Banten.

Modusnya, mereka saling gugat di pengadilan. Kedua mafia tanah itu berinisial DM, 48, tahun dan MCP, 61 tahun. "Sudah ditangkap oleh Polres Metro Tangerang Kota. Jadi, antar-DM dan MCP itu sudah saling atur. Yang *ngatur* itu yang punya pengacara. Pengacara itu sekarang DPO (daftar pencarian orang)," Yusri memaparkan.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Ardi Rahananto, mengatakan pengacara berinisial AM itu memerintahkan MCP untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan pada April 2020. Tujuannya, untuk mengakuisisi tanah di kawasan Alam Sutera. Kemudian, DM dan MCP saling melayangkan gugatan perdata di PN Tangerang. Strateginya, mereka berdamai dalam proses mediasi di persidangan dan menyepakati pihak yang menjadi pemilik lahan 45 hektare itu.

Karena ada perdamaian, PN Tangerang mengeluarkan surat penetapan eksekusi tertanggal 28 Juli 2020. Padahal, surat-surat yang digunakan kedua tersangka untuk mengajukan gugatan perdata itu adalah dokumen palsu. "Surat-suratnya palsu semua. Tanah 45 hektare itu sebenarnya 10 hektare punya warga, 35 hektare sisanya punya PT TM," kata Ardi kepada GATRA.

Pada Juli 2020, Ardi menerangkan, para tersangka membawa organisasi masyarakat untuk melawan perusahaan atau masyarakat setempat. Ada perlawanan dari warga dan perusahaan sehingga pelaksanaan eksekusi lahan tertunda karena terjadi bentrokan.

Tentang dugaan ada atau tidaknya keterlibatan oknum BPN, Ardhi enggan menjelaskan secara gamblang. "Sampai saat ini perbuatan pelaku saja (para tersangka). Kita enggak menutup kemungkinan, siapa yang berbuat ya kita minta pertanggungjawabannya. Apalagi kalau terkait kewenangannya, pasti kita kuatkan alat bukti dengan mekanisme gelar perkara, enggak bisa langsung tuduh," ujarnya.

***

Perjuangan mempertahankan lahan juga dilakukan Sianni Sukardi. Bahkan ada lima gugatan perdata yang dia hadapi dengan orang yang berbeda-beda sejak 2018. Ia menilai, gugatanya pun banyak yang janggal. Mulai keabsahan sertifikat penggugat dan berkas-berkas lainnya yang diragukan.

Selain soal gugatan, Sianni pun sempat pusing dibuat adanya pelaku penyerobotan lahan. Di mana tanah miliknya seluas sekitar 1,3 hektare yang berlokasi di Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten sempat diduduki oleh kelompok "preman". "Mereka datang dan membangun tembok pembatas dan memasang pagar juga plang," kata Sianni kepada GATRA.

Dari pantauan GATRA, plang tersebut memang menyatakan bahwa lahan tersebut dikuasai oleh Hercules cs. GATRA pun mencoba mengonfirmasinya, namun pihak Hercules enggan berkomentar. Belakangan, plang tersebut sudah dicabut oleh pihak Hercules dan sudah tidak ada lagi penjagaan di lokasi.

Sebelumnya, juga pernah ada sekelompok orang yang beramai-ramai dengan cara memasuki lahan milik Masto Sukardi, ayah dari Sianni, dengan mendirikan bangunan bedeng serta menutup dengan pagar menggunakan seng. Akhirnya mereka dilaporkan ke Mapolres Jakarta Barat dan sebanyak 19 orang dijadikan sebagai tersangka serta dijerat dengan Pasal 335 ayat (1e) dan Pasal 167 KUHP.

Menurut Suhanda, bekas Ketua RW 01 Kelurahan Dadap, dari sejumlah warga di wilayahnya, hanya Sianni yang mendapat gangguan dari sekelompok orang tak dikenal. "Lahan warga yang lain sudah banyak yang dijual, sedangkan lahan Bu Sianni ini yang banyak digugat dan bahkan sempat diserobot sama preman," ujarnya kepada GATRA.

Sekarang, Sianni menambahkan, dirinya memang banyak dimenangkan oleh PN Tangerang. "Namun ini habis menang pasti mereka banding, atau muncul gugatan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Nugraha, mengatakan bahwa tidak boleh dalam sebidang tanah ada dua sertifikat. "Ada tumpang tindih karena teknis, ada tumpang tindih karena sengketa kepemilikan.Kalau teknis mungkin secara pemetaan kita ada tumpang tindih, tapi kalau sudah sengketa kepemilikan, dia punya bukti, itu silakan diselesaikan upaya hukum," ujarnya kepada GATRA.

Menurut pakar pertanahan Deddy Setiady, kunci penyelesaian persoalan tanah ada di BPN.Agar tidak timbul persoalan tanah atau sengketa berulang-ulang, BPN harus aktif menguji semua dokumen yang disampaikan. "Jadi harusnya BPN tidak hanya menguji secara formil saja tapi juga meteriilnya. Jadi dicek, dokumen pengajuannya sudah benar atau tidak, bodong atau tidak," katanya kepada GATRA.

Deddy menjelaskan, persoalan sengketa tanah sebenarnya bisa selesai hanya melalui BPN dan tidak perlu melalui pengadilan. Sebab, jika ada persoalan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan, BPN secara internal bisa mengetahui mana dokumen yang valid atau tidak. "Karena yang tahu riwayat pertanahan ini, ya hanya BPN. Mereka yang paham dan ahli. Pihak kepolisian dan pengadilan pun meminta BPN menjadi saksi ahli, karena hanya dia yang tahu," ia membeberkan.

GANDHI ACHMAD, M. GURUH NUARY, ERLINA FURY SANTIKA, UCHA JULISTIAN MONE, DAN WAHYU WACHID ANSHORY

GATRA/ADI WIJAYA

Nugraha

RISMA & SATU METER BUKU

MENTERI Sosial Tri Rismaharini —biasa disapa Risma—sangat gemar membaca buku. Bagi mantan Wali Kota Surabaya ini, membaca merupakan aktivitas penting yang tak bisa dilewatkan. Bahkan, ia sanggup membaca buku yang tebal halamannya mencapai satu meter hanya dalam waktu dua hari. "Saya bisa baca lebih dari satu meter buku setiap hari Sabtu dan Minggu," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 secara daring, yang diikuti sejumlah awak media termasuk Ucha Julistian Mone dari GATRA, akhir Maret lalu.

Perempuan kelahiran Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961, ini menceritakan ikhwal aktivitasnya membaca buku. Hobi membaca buku, Risma mengungkapkan, dimulai saat dirinya mulai bisa membaca pada usia anak-anak. "Saya ingat, saat saya membaca buku bahkan kadang sampai jam dua pagi," katanya.

Kebiasaan Risma membaca buku hingga tengah malam sempat hampir ketahuan oleh sang ayah, yang mengeceknya ke kamar tidur. Agar ayahnya tak curiga, Risma berpura-pura sudah tidur. "Setelah Bapak pergi, saya membaca lagi dan itu terus saya lakukan," katanya.

Anak ketiga dari lima bersaudara ini menerangkan manfaatnya membaca buku. Menurut Risma, membaca buku merangsangnya berimajinasi tentang materi yang sedang dibaca. Bahkan, imajinasi tersebut bisa melompati batas dari materi yang disajikan penulisnya sendiri.

Kebiasaan membaca buku berlanjut hingga Risma dewasa. Dengan membaca berbagai buku membuat Risma paham berbagai hal di luar bidang keilmuan yang ditekuni selama kuliah, yakni arsitektur. Risma meraih gelar sarjana arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Kemampuan Risma memahami berbagai bidang keilmuan di luar arsitektur, seperti pertanian, peternakan, dan keuangan, kerap memicu pertanyaan sejumlah orang: sebetulnya ia sarjana arsitektur atau sarjana dari bidang ilmu lain. "Ya, semuanya saya dapat karena saya suka [membaca] buku," ujar Risma.

DOK.GATRA/ DHARMA WIJAYANTO

MAHFUD MD & KERJA CEPAT POLISI SIBER

KEBERADAAN polisi siber ternyata membawa kesan tersendiri bagi Menko Polhukam, Mahfud MD. Betapa tidak, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu merasakan betul manfaat polisi siber di masyarakat. Polisi siber memikul beberapa peran. Di antaranya aktif menanggapi berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian di media sosial, serta menindak bila ada aktivitas di ruang siber yang melanggar hukum.

Mahfud bercerita, suatu kali ia dimaki-maki oleh seseorang tak dikenal lewat akun medsos. Merasa penasaran dengan sosok yang melontarkan ujaran kebencian kepadanya, Mahfud lantas memanggil polisi siber. "Saya panggil polisi siber. Orang kayak *gini* bisa ditemukan enggak? Eh, 15 menit setelah itu langsung ketemu [profilnya]," ujar Mahfud kepada Andhika Dinata dari GATRA, akhir April lalu.

Polisi lantas memberikan informasi terhadap profil pelaku kejahatan. Mulai hal yang bersifat umum hingga informasi terinci. "Nama [pelaku]-nya ini, dulu tinggal di sini, tanggal sekian pindah ke sini, pekerjaannya ini. Lengkap semua," katanya.

Setelah mengantongi informasi, Mahfud lantas meminta petugas mendatangi pelaku. Pria kelahiran Sampang, 13 Mei 1957, itu mengaku penasaran dengan motif sang penebar teror. "Saya suruh datangi, kenapa dia maki-maki saya. Lalu dia minta maaf," ujar Mahfud.

Mahfud menyebut apa yang ia lakukan menjadi bagian dari edukasi ke masyarakat yang menjadi tugas polisi siber atau polisi virtual. Keberadaan polisi siber sebelumnya sudah diadopsi oleh banyak negara, seperti Tiongkok, India, Thailand, Belanda, dan Estonia. Bahkan, ia yakin, kemampuan polisi Indonesia cukup baik dalam mengawasi ranah siber.

"Polisi itu sebenarnya sudah punya alat yang canggih untuk itu. Misalnya, foto Anda dibaca oleh pemindai lekuk wajah (*face recognition*), lantas keluar identitas atau informasi profil Anda," kata Mahfud.

GATRA/ ADI WIJAYA

GATRA pedia

Go to www.GATRApedia.com untuk Mendapatkan Berbagai Produk dari GATRA MEDIA GROUP

Unduh Aplikasi **GatraPedia** untuk mendapatkan **Majalah Gatra, Gatra Review, buku-buku** dan berbagai **artikel yang ada Anda perlukan.** Kami juga dapat menyediakan berbagai jasa **pembuatan buku, majalah internal, buletin, kalender serta berbagai produk percetakan dengan pengalaman yang tinggi.**

Unduh Aplikasi GATRA di Smartphone Anda

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

@Gatramediagroup @gatracomID @gatra_news

GATRA.com

Jika Anda Butuhkan Berita Terkini yang Akurat dan Terpercaya Go to www.GATRA.com

Baca GATRA, Baru Bicara

Unduh Aplikasi **GATRA** di Smartphone Anda

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

@Gatramediagroup @gatracomID @gatra_news